

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

**RENCANA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA
PAYAKUMBUH
TAHUN 2024**



**DINAS KETAHANAN
PANGAN KOTA
PAYAKUMBUH
TAHUN 2024**



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Tahun 2024.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan RKPD yang bersifat indikatif.

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
 - a. bab I memuat pendahuluan;

- b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. dinas pendidikan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - f. badan penanggulangan bencana Daerah;
 - g. dinas sosial;
 - h. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
 - i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. dinas ketahanan pangan;
 - k. dinas lingkungan hidup;
 - l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. dinas perhubungan;
 - n. dinas komunikasi dan informatika;
 - o. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - q. dinas pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - r. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - s. dinas pertanian;
 - t. sekretariat Daerah;
 - u. sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - v. Bappeda;
 - w. badan keuangan Daerah;
 - x. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - y. inspektorat;
 - z. kecamatan payakumbuh utara;
 - aa. kecamatan payakumbuh barat;
 - bb. kecamatan payakumbuh timur;
 - cc. kecamatan payakumbuh selatan;
 - dd. kecamatan lamposi tigo nagori; dan
 - ee. kantor kesbangpol
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan RKPD mengalami perubahan, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 7 Agustus 2023

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 7 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



DAFRUL PASI M

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR 7

KATA PENGANTAR

Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan nasional. Dengan demikian program ini memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh. Berjalannya sistem ketahanan pangan tersebut sangat tergantung pada adanya kebijakan dan kinerja sektor yang terkait dengan program ketahanan pangan.

Kebijakan pemerintah dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional dan daerah. Dengan berpedoman kepada rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja –PD) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2024.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) ini memuat antara lain ; potensi, kondisi saat ini, sasaran, arah kebijakan, program serta rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 serta rencana indikatif pendanaannya.

Renja-PD ini kiranya dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan Ketahanan Pangan ke depan sesuai amanat UU No 18 Tahun 2012, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Payakumbuh, Agustus 2023
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	12
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	38
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	50
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	51
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	65
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	68
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	68
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA	70
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	71
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	84
BAB IV PENUTUP	11

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022.....	25
Tabel 2. 1Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022.....	38
Tabel 2.2 . Analisis Pencapaian Sasaran 1.....	39
Tabel 2.3 Analaisis Pencapaian Sasaran 2	41
Tabel 2.4 Analisis Pencapaian Sasaran 3	46
Tabel II.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	48
Tabel II.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023..	58
Tabel II.4 A Persandingan daftar kegiatan prioritas hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023 dengan rancangan Renja SKPD Tahun 2024.....	66
Tabel II.4 B Usulan program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023.....	67
Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	76
Tabel IV.1 Rencana Program dan kegiatan Prioritas Daerah tahun Anggaran 2024	97
Tabel IV-2 Usulan Program / Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional Sumber Dana APBN TA 2024.....	110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Lampiran 2. Gender Budget Statement (GBS) Tahun 2024

Lampiran 3. Gender Analysis Pathway (GAP) Tahun 2024

Lampiran 4. Cascading Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, di samping mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 juga memperhatikan kebijakan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, Badan Ketahanan Pangan Nasional dan mengakomodir aspirasi dari masyarakat melalui kegiatan musrenbang serta isu-isu strategis lainnya/di bidang ketahanan pangan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 5. Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri kesehatan Nomor 34 tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
 25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran

Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 22);
31. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023; (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 54).

32. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 73);
33. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 8);
34. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3);
35. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 21);
36. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Renja SKPD

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dimaksudkan untuk :

- a. Memahami dengan lebih baik lingkungan internal dan eksternal Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh sehingga terjadi interaksi aktif dalam pelaksanaan tugas
- b. Menganalisa dan mengkaji secara rinci faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh berdasarkan pemahaman tentang lingkungan internal dan eksternal

- c. Menetapkan kebijakan strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

b. Tujuan Penyusunan Renja SKPD

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2024 disusun dengan tujuan :

- a. Mengantisipasi perubahan lingkungan global yang terjadi begitu cepat seperti perkembangan teknologi dan informasi, sementara sumber daya yang tersedia begitu terbatas. Dengan adanya rencana strategis, organisasi dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat sesuai dengan kondisi perubahan yang terjadi.
- b. Memperoleh hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia
- c. Mengetahui orientasi organisasi di masa yang akan datang
- d. Untuk meningkatkan komunikasi di antara anggota organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja

K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturannya lainnya yang mengatur tentang tugas, fungsi dan uraian tugas serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2023). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam Bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi, telah memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, atau Program dan Kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kota, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis Program/Kegiatan, Pagu Indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

Bab ini memaparkan tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan maupun mengenai ketersediaan anggaran, selain itu juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab instansi. Dari lima program yang ditetapkan, semua telah terlaksana, tingkat keberhasilannya telah dapat diwujudkan secara optimal. Perumusan keberhasilan pencapaian jika dibandingkan dengan indikator keberhasilannya dapat terealisasi hampir 100%. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target Kinerja pada tahun 2021 adalah 85 dan terealisasi 85,6 dengan capaian 100,71% yang didukung 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah

Sub kegiatan ini berupa penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang terdiri dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) awal dan Rencana Kerja (Renja) perubahan, dokumen RKA dengan target sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.106.020 dan terealisasi sebesar Rp 6.952.360 atau 97,84%

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini berupa penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang terdiri dari LKJiP, LKPJ, Evaluasi Renja Triwulan 1,2,3 dan 4 , SAKIP dengan target sebanyak 6 dokumen, dan terealisasi 7 dokumen dengan capaian 116,67%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.561.770,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.371.100,- atau 97,77%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub kegiatan:

1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Sub kegiatan ini berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dengan target 23 orang dan terealisasi sebanyak 16 orang dan pembayaran jasa pengelola administrasi keuangan kantor dengan target 17 orang dan terealisasi 14 orang dengan rata-rata capaian 75,96%. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.202.267.653,- terealisasi sebesar Rp. 1.853.123.863,- atau 84,15%.

2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.

Sub kegiatan ini berupa penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dengan target sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.241.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.185.740 atau 97,50%.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Sub kegiatan ini berupa pengadaan pakaian dinas harian dengan target 19 stel dan terealisasi 17 stel dan pakaian Korpri dengan target 16 stel dan terealisasi sebanyak 16 stel dengan rata-rata

capaian 94,73 %. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 12.232.440,- dan terealisasi Rp. 12.195.000,- atau 99,69%.

4. Administrasi Umum Perangkat daerah

1) PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor dengan target sebanyak 9 jenis yaitu berupa baterai AAA untuk remot, baterai AA untuk jam, nola lampu hemat energy, fitting colok, lampu emergency, lampu spiral, lampu senter LED, steker T, Stop kontak 4 lubang dan terealisasi sebanyak 9 jenis dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.615.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.609.500,- atau 99,64%.

2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Sub kegiatan ini berupa penyediaan barang belanja modal dengan target 8 unit dan terealisasi 7 unit yaitu AC (2 unit), Tangga, Dispenser, Karpet lantai (2 unit) dan TV smart dengan capaian 87,50%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 35.984.900,- dan realisasi Rp. 28.635.000,- atau 79,58%.

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini berupa penyediaan bahan logistik kantor yaitu alat tulis kantor (ATK) dengan target sebanyak 61 jenis dan terealisasi sebanyak 61 jenis dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.662.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.288.600,- atau 97,75%.

4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target barang cetakan 100 lembar, penggandaan 23.047 lembar dan penjilidan 61 buku, terealisasi sebanyak barang cetakan 100 lembar, barang penggandaan 23.047

lembar dan penjiilidan 61 buku, dengan rata-rata capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.387.330,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.384.120,- atau 99,97%.

5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Sub kegiatan ini berupa penyediaan surat kabar dan majalah dengan target sebanyak 2 media yaitu Padang Ekspres dan Singgalang yang terealisasi sebanyak 2 media, dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.392.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.392.200 atau 100 %.

6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat bagi PNS Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam rangka mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan target sebanyak 176 OH dan luar daerah 84 OH dan terealisasi sebanyak 198 OH dalam daerah, 99 OH luar daerah, dengan rata-rata capaian 171,45%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 195.224.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 194.769.233,- atau 99,77 %.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Sub kegiatan ini berupa pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan target 6 unit dan realisasi 6 unit yaitu komputer PC, Laptop (2 unit), Printer (3 unit) dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 71.225.500,- dan realisasi sebesar Rp. 68.695.500,- atau 96,45%.

2) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Sub kegiatan ini berupa pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan target 1 jenis dan realisasi 1 jenis yaitu pengadaan papan nama kantor dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.771.060,- dan realisasi Rp. 1.771.000,- atau 100%.

6. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah dengan sub kegiatan:

1) Penyediaan Jasa surat menyurat

Sub kegiatan ini berupa pembelian benda pos yaitu materai 10.000, dengan target sebanyak 185 buah dan terealisasi 185 buah dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.850.000,- atau 100%.

2) Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini berupa penyediaan jasa telekomunikasi, air dan listrik sebanyak 3 rekening dan terealisasi sebanyak 3 rekening dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 843.236,- dan terealisasi Rp. 838.062 atau 99.39%.

3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Sub kegiatan ini berupa penyediaan jasa pelayanan umum kantor (supir) dengan target sebanyak 1 orang dan terealisasi sebanyak 1 orang dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.825.728,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.682.372,- atau 99,59%.

7. Kegiatan pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah.

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin kendaraan dinas eselon II yaitu penyediaan BBM, Pembayaran pajak dan servis sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit dengan capaian 100%.

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.190.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.573.745,- atau 75,46%.

2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional

Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin kendaraan dinas yang terdiri dari penyediaan BBM, pembayaran pajak dan servis kendaraan roda 2 sebanyak 8 unit, roda 4 sebanyak 2 unit dan terealisasi sebanyak kendaraan dinas roda 2 sebanyak 8 unit, roda 4 empat sebanyak 2 unit dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 63.305.215,- atau 97,54%.

3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan sarana kantor yaitu dengan target sebanyak 11 unit dan terealisasi sebanyak 11 unit yaitu pemeliharaan AC kantor (5 unit), Komputer , Laptop (2 unit) dan printer (3 unit) dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.310.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.288.200,- atau 99,70%.

B. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat dengan indikator kinerja yaitu:

- Persentase cadangan pangan yang tersedia dengan target 50% dan realisasi 50,60 % dengan pencapaian 101,20%
- Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE dengan target 60% dan realisasi 96% dengan pencapaian 160%
- Persentase penurunan konsumsi beras dengan target 1% dan realisasi 0,94% dengan pencapaian 94%

- Cakupan supply lembaga distribusi pangan dengan target 15% dan realisasi 31% dengan pencapaian 206,00%
 - Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan dengan target 60% dan realisasi 70,65% dengan pencapaian 117,75%
1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
 - 1) Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan makanan
 Sub kegiatan ini berupa penyusunan dokumen Neraca bahan makanan dan harga pangan dengan target dokumen neraca bahan makanan sebanyak 1 dokumen dan dokumen harga pangan sebanyak 1 dokumen dan teralisasi masing masing 1 dokumen dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.468.120,- terealisasi dan terealisasi sebesar Rp. 72.295.150,- atau 95,80%.
 - 2) Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan
 Sub kegiatan ini berupa pemantauan harga pangan, pemantauan pasokan dan pemantauan stok pangan dengan target masing masing 365 hari, 56 kali dan 56 kali terealisasi sebanyak 365 hari 56 kali, 56 kali, dengan capaian 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.516.160,-, dan terealisasi sebesar Rp. 5.491.320,- atau 99,55 %.
 - 3) Pengembangan kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
 Sub kegiatan ini berupa koordinasi-koordinasi dan pembinaan ke kelompok LDPM (lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) yang ada di kota Payakumbuh yaitu dengan target sebanyak 8 kali terealisasi sebanyak 8 kali dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.374.810,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.782.000,- atau 88,97%.

4) Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan TokoTani Indonesia

Sub kegiatan ini berupa koordinasi dan pembinaan Pengembangan Usaha Pangan masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI) yang ada di Kota Payakumbuh yaitu Gapoktan Aur Kuning yang beralamat di Kel. Sawah Padang Aur Kuning, Kec. Payakumbuh Selatan dengan target sebanyak 2 kali terealisasi 2 kali dengan capaian 100%. Juga dilakukan pelaksanaan kegiatan pasar pangan murah dengan target 1 kali realisasi 1 kali dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.408.050,- dan terealisasi Rp. 4.866.020,- atau 89,98%.

2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan pangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan

1) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini berupa pembelian cadangan pangan berupa beras yang dititipkan di Perum Bulog Kantor Cabang Bukittinggi Jl. Perwira no. 182 Kota Bukittinggi dengan target sebanyak 1 ton dan terealisasi 1 ton dengan capaian 100%, Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.999.920,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.627.300,- atau 97,52%

3. Kegiatan Pelaksanaan pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

1) Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun

Sub Kegiatan ini berupa pembuatan buku PPH (Pola Pangan Harapan) Konsumsi dengan target sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.124.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.063.740,- atau 98,52%.

2) Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

Sub kegiatan ini berupa :

- a. Pemberian Bantuan Benih Sayuran, Polybag dan Kompos diberikan kepada 5 (lima) kelompok Dasawisma, Adapun kelompok Dasawisma penerima bantuan tersebut adalah sebagai berikut : Dasawisma Melati 11 Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat; Dasawisma Seroja 8 Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur; Dasawisma Teratai Putih 5 Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagari; Dasawisma Cempaka 8 Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan; dan Dasawisma Jasmin 25 Kelurahan Tigo Koto Dibaruah Kecamatan Payakumbuh Utara.
- b. Penyaluran bantuan DAK Non Fisik kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) bagi 11 KWT yaitu Tahap Penumbuhan KWT Lumbuang Rasoki Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat, KWT Rinai Talao Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, KWT Aisyah Kelurahan Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Timur, KWT Dahlia Sakato Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara. Tahap Pengembangan KWT Sejahtera Kelurahan Padang Data Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat; KWT Sakeso Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat; KWT Ingin Maju Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara; KWT Karya Bunda Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara; KWT Serumpun Bambu Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur; KWT Edelweis Kelurahan Sawah Padang Aur Kuning Kecamatan Payakumbuh Selatan; dan KWT Cempaka Putih Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagari.

- c. Pelatihan pangan lokal non beras non terigu dan sosialisasi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan target peserta 30 orang dan terealisasi 30 orang.

Adapun rata-rata capaian kinerja untuk seluruh pelaksanaan kegiatan adalah 100%

Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 634.361.588,- dan terealisasi sebesar Rp. 626.406.840,- atau 98,75%.

- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun

Sub kegiatan ini berupa mengikuti pelaksanaan Lomba Ketahanan Pangan Adikarya Pangan Nusantara (APN) tingkat Provinsi, yang diwakili oleh KWT Sejahtera sebanyak 1 kali terealisasi sebanyak 1 kali dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 8.849.740,- dan realisasi keuangan Rp. 8.558.670,- atau 96,71%

C. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Penanganan kerawanan Pangan dengan indikator kinerja persentase bahan pangan yang telah memenuhi Angka kecukupan Energi (AKE) dengan target 88% dan realisasi 88% dengan capaian 100% dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

- 1) Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan

Sub kegiatan ini berupa pembuatan laporan SKPG (Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi) dengan target 12 dokumen

teralisasi sebanyak 12 dokumen dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 18.924.730,- dan realisasi keuangan Rp. 18.563.100,- atau 98,09%

2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten kota

Sub kegiatan ini berupa pembinaan bagi pelaksana Desa Mandiri Pangan dan Desa Mandiri Pangan lanjutan yang ditetapkan melalui SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat nomor 521-118-2021 tentang Penetapan Lokasi Nagari/Kelurahan/Desa Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kawasan dan Pembinaan Nagari Mandiri Pangan di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dengan target sebanyak 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Payobasung, Kec. Payakumbuh Timur Kelompok Tani Sejahtera Bersama, dan 4 Desa Mandiri Pangan lanjutan yaitu Kel. Tiakar yakni Kelompok Affinitas Bunga, Kel. Ikua Koto Dibalai yakni Kelompok Sepakat dan Sepakat Bersama, Kel. Koto Tuo Limo Kampuang yakni Kelompok Koto Tuo Limo Kampuang serta Kel. Koto Panjang Dalam yakni Kelompok Sejahtera dan Suka Maju dan terealisasi sebanyak 1 Kelurahan Mandiri Pangan dan 4 Kelurahan Mandiri Pangan lanjutan dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.875.000,-, dan terealisasi sebesar Rp. 4.780.500,- atau 98,06%.

D. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Pengawasan keamanan Pangan dengan indikator kinerja persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi dengan target 90% terealisasi 90% dengan capaian 100% dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

1) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini berupa pelaksanaan Sosialisasi keamanan pangan segar dengan peserta 20 orang yang terdiri dari anggota KWT, anggota PKK dan beberapa Guru PAUD, Temu teknis penguatan kelembagaan pangan segar sebanyak 20 orang dengan peserta dari unsur Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Loka BPOM Kota Payakumbuh, Satpol PP dan Damkar serta PKK Kec. Se-Kota Payakumbuh, serta melakukan uji sampel pangan segar sebanyak 10 sampel terealisasi sebanyak 40 orang dan 10 sampel dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 17.476.894,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.705.290,- atau 89,86%.

2) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah kabupaten Kota

Sub Kegiatan ini berupa sosialisasi dengan target 20 orang peserta yang terdiri dari unsur Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, anggota KWT, Kepala Sekolah Dasar, sosialisasi pangan segar bersertifikasi dengan target peserta 20 orang terdiri dari, pelaku Rice Milling Unit (RMU) dan BPP (Balai Penyuluh Pertanian) di Kota Payakumbuh serta sosialisasi pelaku usaha dengan target peserta 20 orang yang terdiri dari pelaku usaha pangan segar, pelaku usaha penjual sayur, buah, ikan kering dan ikan segar, Loka BPOM Kota

Payakumbuh, dan KWT yang ada di Kota Payakumbuh, dan terealisasi 60 orang peserta dengan capaian 100%. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 8.162.340,- dan terealisasi Rp. 7.698.850,- atau 94,32%.

Tabel II-1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D
TAHUN 2024

TABEL 1																								
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022																								
SKPD : DINAS KETANANAN PANGAN KOTA PATAKUMBUN																								
SASARAN	NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SAMPAI TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA s/d RENJA TAHUN 2021		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2022		REALISASI KINERJA PADA TRIWULANAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA s/d TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA s/d TAHUN 2022 (%)		SKPD PENA NGGU NG JAWA B
				I		II		III		IV		I		II		III		IV		I		II		
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Program Pelayanan Administrasi	Nilai RCM	89		85,2		85												85,2				
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyerat		2922 bh	12.178.000	2199	9.952.000													2199	9.952.000		73,51	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	3 rek	142.700.000	3 rekening 4 tahun	51.595.495													3 rekening 4 tahun	51.595.495		36,15	
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	172 unit	39.206.250	106 unit 16 jamis	12.880.000													106 unit 16 jamis	12.880.000		45,95	
	4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional	51 unit	21.703.000	24 unit	9.614.400													24 unit	9.614.400		44,30	
	5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa pengalihan administrasi keuangan kantor	171 rang	1.161.323.456	85 rang	723.425.708													85 rang	723.425.708		62,29	
	6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor	96 jenir	63.483.339	58 jenir	32.070.035													58 jenir	32.070.035		50,52	
	7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	195 item	73.332.850	110 item	43.894.750													110 item	43.894.750		59,84	
	8	Penyediaan barang cetakan dan pengendalian	Jumlah barang cetakan, pengendalian dan penulisan	404 buku, 9499 bh, 91126 lbr, 151 jilid	66.356.962	294 buku, 2 rim, 49.536 lbr, 74 jilid	33.407.250													294 buku, 2 rim, 49.536 lbr, 74 jilid	33.407.250		40,87	
	9	Penyediaan kampanye internet/televisi penerangan kesehatan	Jumlah kampanye internet/televisi penerangan	44 jenir	12.947.000	19 jenir	7.554.750													19 jenir	7.554.750		59,81	
	10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	17 unit	114.302.000	21 unit	144.895.000													21 unit	144.895.000		124,77	
	11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan majalah	24 media	65.400.000	10 media	38.425.000													10 media	38.425.000		50,70	
	12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas	3755 porsi	65.254.000	1694 porsi	33.205.010													1694 porsi	33.205.010		51,01	
	13	Pengelolaan keuangan dan administrasi KLD	Jumlah keuangan dan administrasi ke luar negeri	1 tahun	956.446.405	229 kali, 100 kali	650.547.116													229 kali, 100 kali	650.547.116		68,95	
				2.727.612.662		1.799.536.514												1.799.536.514				64,55		
																						22,40%		

1		2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
					K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Perantara sarana dan prasarana kantor dalam kandirib-air	80%			80%													80%					
	1	Pengadaan kendaraan dinas/aporasiional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	6 unit	446.000.000		4 unit		73.444.000											4 unit		73.444.000		16,47	
	2	Pengadaan mobil	Jumlah pengadaan mobil	40 unit	318.450.000		4 item		148.410.000											4 item		148.410.000		46,60	
	3	Pemeliharaan rutin/kurkula kendaraan dinas/aporasiional	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas/aporasiional	96 unit	550.775.000		26 unit		250.065.478											26 unit		250.065.478		45,40	
	4	Pengadaan perlengkapan gedung/kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung/kantor				1 jenis		10.000.000											1 jenis		10.000.000		0,00	
						764.450.000			481.919.478													481.919.478			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				63,04					
Prediktor Kinerja																				rendah					
Meningkatnya disiplin aparatur	III	Program Peningkatan Disiplin	Perantara ASN berpakaian dinas	100%			100%													100%					
	1	Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	171 set	89.450.000		73 set		44.580.000											73 set		44.580.000		49,84	
					89.450.000				44.580.000													44.580.000			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				49,84					
Prediktor Kinerja																				rendah					
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (NIP)	IV	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (NIP)	Nilai evaluasi AKIP oleh masyarakat	A			A													A					
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	18 dokumen	39.250.000		9 lap		12.177.525											9 lap		12.177.525		31,03	
	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	24 dokumen	38.800.000		12 lap		10.242.175											12 lap		10.242.175		26,40	
						78.050.000			22.419.700													22.419.700			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				28,72					
Prediktor Kinerja																				rendah					

sangat rendah

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
Meningkatnya palakamrumi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	VI	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	1. 1. 60% 2. 2. 50% 3. 3. 90%	1. 1. 50% 2. 2. 50% 3. 3. 90%																1. 50% 2. 1% 90%	3.			
	1	Pemanfaatan pakanan untuk pengembangan pangan	- Jumlah peserta zakalah lapang aptimalisasi pakanan - jumlah KWT penerima bantuan benih sayuran, palybaq dan kampar - jumlah darauirma penerima bantuan benih sayuran, palybaq dan kampar - jumlah kulurahan perantahan KRPL - jumlah buku PPH Kanurumi	30 KWT, 90 KWT, 165 Darauirma, 15 kulurahan, 5 dak	3.643.129.628	15 KWT, 10 KWT, 60 darauirma, 6 kul, 3 dak	1.529.572.833													15 KWT, 10 KWT, 60 darauirma, 6 kul, 3 dak	1.529.572.833	41,99		Dinar Ketahanan Pangan
	2	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	- Jumlah pelaksanaan Lamba Cipta Manu Tingkat Kota dan tingkat Provinsi Jumlah ujirampol pangan zoqar yahq beredar di masyarakat - Jumlah peserta sarialuripangan B2SA - Jumlah peserta sarialurikuaman pangan	12 kali, 20 kali, 210 araq, 260 arq	492.250.000	6 kali, 14 kali, 90 arq, 90 arq	397.424.930													6 kali, 14 kali, 90 araq, 90 araq	397.424.930	80,74		Dinar Ketahanan Pangan
	3	Pengembangan dan pembinaan pangan lokal nan berar nan toriq	- jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal nan berar nan toriq - jumlah lamba pengalahan pangan lokal nan berar nan toriq	260 araq, 6 kali	598.274.049	60 araq, 2 kali	203.736.428													60 araq, 2 kali	203.736.428	34,57		Dinar Ketahanan Pangan
					4.724.653.677		2.130.736.191														2.130.736.191	45,10		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	%		
		Kegiatan																							
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85%		85%										85%									
		Sub Kegiatan																							
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos material 6000, material 3000 dan cek	958 bh	3.734.760	168 buah	2.061.000	185 buah	1.850.000	60 buah	650.000	20 buah	630.000	15 buah	200.000	90 buah	370.000	185 buah	1.850.000	353 bh	3.911.000			104,72	Dinar Ketahanan Pangan
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa telekomunikasi, sumber daya air, dan listrik	3 rek	34.560.000	3 rek	10.604.554	3 rek	843.236	3 rek	838.062	-	-	-			3 rek	838.062	3 rek	11.442.616			33,11	Dinar Ketahanan Pangan	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah THL yang disediakan	2 org	50.956.968	1 org	16.143.366	1 org	34.825.728	1 orang	5.755.548	1 orang	8.629.322	1 orang	8.633.322	1 orang	11.664.180	1 orang	34.682.372	1 org	50.825.738			99,74	Dinar Ketahanan Pangan
		Kegiatan																							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85%		85%												85%							
		Sub Kegiatan																							
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas eselon II	2 unit	78.380.000	1 unit	25.251.348	1 unit	39.190.000	1 unit	3.371.299	1 unit	3.472.500	1 unit	6.218.346	1 unit	16.511.600	1 unit	29.573.745	2 unit	54.825.093			69,95	Dinar Ketahanan Pangan
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional roda empat Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional roda dua	4 unit, 16 unit	115.700.000	10 unit	63.425.100	10 unit	64.900.000	10 unit	9.899.000	10 unit	13.886.000	10 unit	13.018.000	10 unit	26.502.215	10 unit	63.305.215	10 unit	126.730.315			109,53	Dinar Ketahanan Pangan
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana kantor	10 unit	5.760.000	5 unit	3.570.000	11 unit	7.310.000	2 unit	3.050.000	2 unit	1.023.200	1 unit	300.000	7 unit	2.915.000	11 unit	7.288.200	16 unit	10.858.200			188,51	Dinar Ketahanan Pangan
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 paket	8.000.000	0	0	-	0	-	0						-	0	0	0	0,00			0,00	Dinar Ketahanan Pangan

Rencana Kerja 2024
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re		
		Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi cadangan pangan masyarakat yang diadakan	1 kali	12.848.420	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	
		Kegiatan																							
		Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan persentase masyarakat yang mendapatkan pendampingan persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu persentase meningkatnya sarana pengolahan	40% 5% 15% 10%		35% 5% 13% 7%		40% 5% 15% 10%												47% 21% 15% 10%					
		Sub Kegiatan																							
		Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Jumlah buku PPH Konsumsi	2 dok	8.248.900	1 dak	4.077.400	1 dok	4.124.950	0	390.000	-	500.000	0	0	1 dak	3.173.740	1 dak	4.063.740	2 dak	3.141.140			98,68	Dinas Ketahanan Pangan
		Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah kelompok peserta Sekolah Lapang optimalisasi pekarangan Jumlah KWT penerima bantuan benih sayuran, polybag dan kompos Jumlah dasawisma penerima bantuan benih sayuran, polybag dan kompos Jumlah peserta pelatihan pangan lokal non beras non terigu Jumlah peserta sosialisasi B2SA Jumlah THL rumah bibit Jumlah buruh tak terlatih	80 org 10 KWT 20 dasawisma 40 org 40 org 4 org 2 org	975.863.566	7 KWT 5 KWT 5 Dasawisma 20 org 20 org 20 org 2 org	588.697.824	11 KWT 5 Dasawisma 30 org 20 org 20 org 2 org	634.341.588	0	24.121.096	11 KWT 5 Dasawisma 30 org 20 org 20 org 2 org	264.343.344	11 KWT 5 Dasawisma 30 org 20 org 20 org 2 org	69.162.144	11 KWT 5 Dasawisma 30 org 20 org 20 org 2 org	268.760.256	11 KWT 5 Dasawisma 30 org 20 org 20 org 2 org	626.406.940	11 KWT 5 Dasawisma 30 org 20 org 20 org 2 org	1.215.104.664		124,52	Dinas Ketahanan Pangan	

	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi kapta per tahun	- Jumlah Lomba Ketahanan Pangan (APK) tahun 2021 - Jumlah Peningkatan Wara Pangan Sedunia (HPS) - Jumlah lomba Pengolahan pangan lokal non beras non terigu - Jumlah lomba cipta menu tingkat kota dan	- 2 kali - 2 kali - 2kali - 4 kali	106.434.400	- 1 kali - 0 kali - 0kali - 0 kali	21.446.000	- 2 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali	3.048.740	0	0	1kali	796.100	1kali	4.041.600	1kali	3.190.970	1kali	3.550.470	- 3 kali	34.055.070	21,24	Dinas Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan ketahanan pangan		Ster PPH Kerasidom	88		10,77	04										10,82						
	Program Pemasangan Kerjasama Pangan	Persentase bahan pangan yg telah memenuhi AKE	88%	46.032.500	88%	60c										60c						
	Kegiatan																					
	Peningkatan kerjasama pangan kawasan Kabupaten/Kota	- Persentase peningkatan hasil pemantauan pelaksanaan	15%		15%	15c										00c						
	Sub Kegiatan																					
	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan ketahanan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Desa Mandiri Pangan tahap pengembangan - jumlah desa mandiri pangan lanjutan yang dibina	- 1 kelurahan - 4 kelurahan	33.032.500	- 1kali*4 kali	15.044.405	- 1 kelurahan - 4 kelurahan	4.175.000	0	0	-	-		- 1kali*4 kali	4.706.500	- 1kali*4kali	4.708.500	- 1kali*4kali	10.175.425	40,17	Dinas Ketahanan Pangan	
	Pelaksanaan kegiatan, pengolahan, dan penyuluhan cadangan pangan pada ketahanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang memiliki Balita Rawan Gizi yang dibantu	20 paket	25.000.000	0	0	10KK	5.308.340	0	0	-	747.400	10kk	4.254.000	10kk	122.800	10kk	5.045.300	10kk	5.045.300	14,52	Dinas Ketahanan Pangan

	Kegiatan																					
	Penyusunan Peta Ketahanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	- Persentase rekomendasi yang diindaklanjuti instansi terkait	50%		50%		50%								50%							
	Sub Kegiatan																					
	Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan ketahanan pangan	Jumlah peta ketahanan dan ketahanan pangan (FSNA) yang dibuat	1 dok	50.000.000	0	0	12 dok	15.504.738	0	0	6 dok	2.118.390	2 dok	504.000	10 dok	15.174.300	12 dok	11.562.800	0	2.118.390	4,20	Dinas Ketahanan Pangan
4.	Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	2. Tingkat Keamanan Pangan	tinggi		tinggi		tinggi									tinggi						
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	90%	114.451.288	0	0	90%								90%							
	Kegiatan																					
	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan sayur daerah Kabupaten/Kota	- Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan - persentase rekomendasi yang diindaklanjuti oleh instansi terkait	- 15% - 75%		- 15% - 75%		- 15% - 75%								- 15% - 75%							
	Sub Kegiatan																					
	Penguatan kelembagaan keamanan pangan sayur daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah uji sampel pangan sayur - Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan sayur - Jumlah peserta forum teknis penguatan kelembagaan pangan sayur	32 sampel, 60 org, 80 org	91.474.148	-40 sampel, 38 org, 38 org	14.577.329	- 10 sampel - 20 orang - 20 org	17.476.894	0	0	9 sampel	3.379.080	9 sampel 20 org	1.000.490	- 10 sampel - 20 orang - 20 org	4.804.099	- 10 sampel - 20 orang - 20 org	15.705.249	-50 sampel, 50 org, 50 org	50.282.519	54,40	Dinas Ketahanan Pangan

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah peserta sosialisasi pangan segar org, 60 org - Jumlah peserta sosialisasi pangan segar bersertifikasi - Jumlah peserta sosialisasi pelaku usaha	60 org, 60 22.977.140	- 20 org - 20 org - 20 org	12.159.040	- 20 org - 20 org - 20 org	8.162.340	0	0	-	-	- 20 org - 20 org - 20 org	7.290.400	- 20 org - 20 org - 20 org	405.450	- 20 org - 20 org - 20 org	1.638.850	- 40 org - 40 org 40 org	20.457.890	-	40 org	89,04	Dinas Ketahanan Pangan
		JUMLAH		6.911.380.094		2.911.057.932		3.530.514.479		460.878.752	54	896.446.939		660.236.576		1.125.272.623		3.142.834.890		6.053.832.822	89,02			

Pagakumbuh, Agustus 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pagakumbuh



EDYDEI ARDA, S.P
NIP. 19700124 198003 1001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Kantor Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Penilaian akuntabilitas kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator hasil dan indikator keluaran yang merupakan indikator mikro dalam pencapaian sasaran.

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebanyak 4 (empat) sasaran.

Tahun 2023 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh periode Tahun 2023-2026, dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel . 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Skor PPH Ketersediaan	Nilai	89	89,02	100,02
2	Skor PPH Konsumsi	Nilai	85	85,09	100,10
3	Tingkat Keamanan pangan	Level	Tinggi	Tinggi	100,00

4	Stabilitas Harga				
	a. Beras	%	≤10	2,95	170,5
	b. Cabe	%	≤25	32,74	69,04
	c. Bawang	%	≤10	16,64	133,44
5	Stabilitas Pasokan	%	≥77	79,00	102,59
6	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	A	A	100

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 5 indikator kinerja dari Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel .2.2
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021		% Target	Capaian Tahun 2022		% Target	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2022 terhadap akhir renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Skor PPH Ketersediaan	%	88,5	88,77	100,05	89	89,02	100,02	Sangat baik	89	100,02

Sumber : DKP, 2022

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dilihat dari indikator : Skor PPH Ketersediaan.

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dilihat dari indikator : Skor PPH Ketersediaan.

Capaian kinerja nyata indikator Skor PPH Ketersediaan adalah sebesar 89,02 dari target sebesar 89 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,02 % dengan kategori



sangat baik. Capaian ini hampir sama dari capaian tahun sebelumnya hanya saja sedikit turun 0,03 Point.

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dengan indikatornya ini menjadi sangat

penting karena tertuang dalam SPM dan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun

2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah.

Indikator keberagaman ketersediaan pangan yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH).



Penyusunan PPH dibuat berdasarkan pertimbangan ukuran pola konsumsi yang dibuat oleh FAO. Susunan PPH memuat 9 (sembilan) kelompok pangan mulai dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran dan buah, biji-bijian dan lemak berminyak, gula serta kelompok lain-lainnya.

Sasaran 2

Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel .2.3
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021		%	Capaian Tahun 2022		%	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2021 terhadap akhir renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Skor PPH Konsumsi	%	84	84,20	100,24	85	85,09	100,10	Sangat baik	85	99,05
2	Tingkat Keamanan Pangan	Level	tinggi	tinggi	100	tinggi	tinggi	100	Sangat baik	Tinggi	100

Sumber : DKP, 2022

Sasaran meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu Skor PPH Konsumsi dan Tingkat Keamanan Pangan. Sasaran dengan 2 indikatornya ini juga tertuang dalam SPM dan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan.

A. Indikator Pertama yaitu Skor PPH Konsumsi

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan (RPJMN) 2015-2019 ada empat (4) strategi utama :

1. Peningkatan ketersediaan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri.
2. Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan
- 5.

Salah satu dari empat (4) arah kebijakan pangan yaitu perbaikan kualitas



konsumsi pangan dan gizi masyarakat telah menjadi indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator kinerja dibidang ketahanan pangan yaitu pencapaian skor PPH Konsumsi. Pentingnya pencapaian skor PPH Konsumsi tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang

Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Tercapainya penganeekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai konsumsi pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Menurut FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH Konsumsi sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari Skor Pangan (dietary score) dan dikenalnya sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang.

Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula sayur dan buah. Skor PPH di nilai dengan angka 100. Kegunaan PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Apabila terjadi ketergantungan pada jenis pangan tertentu, maka akan mengakibatkan konsumsi total meningkat dan menuntut produksi total yang tinggi pula. Oleh karena itu, jika terjadi sedikit saja gangguan pada ketersediaan pangan tersebut akan berakibat besar pada sistem ketahanan pangan nasional.

Apabila keragaman konsumsi pangan dibawah anjuran, maka tingkat konsumsi masyarakat perlu ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan pangan dan gizi, peningkatan ketersediaan, serta pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah.

Untuk penghitungan data PPH Konsumsi Tahun 2022 berdasarkan data sekunder berasal dari data hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu jenis data sekunder yang digunakan untuk analisis konsumsi pangan. Survey tersebut dilakukan oleh BPS setiap tahunnya yang terdiri dari data

Nasional, Provinsi dan Kota. Data yang dikumpulkan merupakan data konsumsi/pengeluaran Rumah Tangga mencakup data makanan dan bahan makanann untuk konsumsi/pengeluaran makanan dikumpulkan data kuantitas dan nilainya sesuai dengan rincian komoditas yang terdapat pada kuisioner Susenas. Dalam analisis konsumsi pangan, khususnya menggerakan data survey konsumsi pangan, diperlukan data/instrument pendukung antara lain Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) , Daftar Ukuran Rumah Tangga (URT), Daftar Pangan Acuan, Daftar Konversi Perubahan Bentuk, Daftar Konversi Kode Kelompok Pangan, Daftar Konversi Penyerapan minyak.

Setelah dilakukan penghitungan PPH Konsumsi dengan Angka Kecukupan Energi 2.100 kkal/kapita/hari dan Angka Kecukupan Protein 57 gr/kapita/hr didapat nilai PPH Konsumsi Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebesar 85,09 dengan capaian kinerja 100,10% termasuk kategori sangat baik.

B. Indikator kedua adalah Tingkat Keamanan Pangan



Makanan merupakan sumber energi dan sebagai zat gizi untuk mendukung hidup manusia. tetapi makanan juga dapat menjadi wahana bagi unsur pengganggu kesehatan manusia. secara umum bahaya yang timbul dari makanan/minuman sering disebut keracunan makanan. Timbulnya bahaya dapat terjadi

melalui unsur mikroorganisme, kimia atau alami.

Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang

berbahaya bagi kesehatan. Dalam upaya mewujudkan sistem jaminan mutu di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan standarisasi melalui Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang “standardisasi Nasional” yang selanjutnya PP dimaksud dijabarkan di sektor pertanian melalui keputusan-keputusan Menteri Pertanian No. 170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional di sektor pertanian. Dalam keputusan ini juga memuat tentang kebijakan sistem jaminan mutu di sektor pertanian.

Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat di Kota Payakumbuh supaya masyarakat terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh bahan-bahan berbahaya, seperti residu pestisida, bakteri, dan formalin. Maka perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar di Kota Payakumbuh. Adapun pengawasan dan pengambilan sampel bahan pangan telah dilaksanakan 1 kali sebanyak 10 sampel yang terdiri dari uji residu pestisida dan uji formalin.

Pengujian sampel dilakukan terhadap 10 sampel pangan segar diantaranya pangan segar asal tumbuhan dan pangan segar asal hewan. Sampel pangan segar diambil dari Pasar Ibu Kota Payakumbuh. Pemeriksaan sampel dilakukan sebanyak 2 kali, yakni 1 kali uji residu pestisida dan 1 kali uji formalin.

Dari pemeriksaan terhadap 10 sampel yang terdiri dari residu pestisida 4 komoditi dan formalin 6 jenis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

No	Pemeriksaan Yang Dilakukan	Jumlah sampel diperiksa	Hasil Analisa Yang Tidak Aman	% sampel makanan yang aman dikonsumsi	Ket
1.	Residu pestisida	4	0 komoditi	100%	tinggi
2.	Formalin	6	1 komoditi	83,33 %	tinggi
	Tingkat Keamanan Pangan			91,6	Tinggi

Keterangan Level Tingkat Keamanan :

0 -60 % : Tidak Aman

61 – 75 % : Cukup

76 – 85 % : sedang

86 – 100 % : Tinggi

Jika diperhatikan perkembangan capaian Tingkat Keamanan Pangan ini dari tahun ke tahun dapat dijelaskan bahwa Tingkat Keamanan Pangan pada Tahun 2017 tercapai 100% dari target level sedang, begitu juga dari Tahun 2018- 2022 terealisasi 100%.

Sasaran 3 Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel .2.4
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021		% Realisasi	Capaian Tahun 2022		%	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2022 terhadap akhir renstra (%)
			Target			Target	Realisasi				
1	Stabilitas Harga										
	* beras	%	≤10	1,78	182,2	≤10	2,95	170,5	Sangat baik	10	170,5
	* cabe	%	≤25	18,85	124,6	≤25	32,74	69,04	Cukup	25	69,04
	* bawang	%	≤25	11,08	155,68	≤25	16,64	133,44	Sangat baik	25	133,44
2	Stabilitas Pasokan	%	≥77	79	102,59	≥77	79,00	102,59	Sangat baik	77	102,59
	Rata-rata Capaian Kinerja				142,98	≤10		118,89	Sangat baik		118,89

Sumber : Data diolah, DKP 2022

Sasaran meningkatnya kelancaran distribusi pangan dilihat dari indikator : Stabilitas Harga Beras, Stabilitas Harga Cabe, Stabilitas Harga Bawang, dan Stabilitas Pasokan dengan rata-rata capaian kinerja 118,89% kategori sangat baik

Capaian kinerja indikator Stabilitas Harga Beras adalah sebesar 2,95 % dari target sebesar 10% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 170,5 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini sedikit mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya

Capaian kinerja indikator Stabilitas Harga Cabe adalah sebesar 32,74 % dari target sebesar 25% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 69,04% dengan kategori cukup. Capaian ini lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya.

Capaian kinerja indikator Stabilitas Harga Bawang adalah sebesar 16,64 % dari target sebesar 25% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 133,44 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya.

Capaian kinerja nyata indikator Stabilitas Pasokan adalah sebesar 79,00% dari target sebesar 77% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,59 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya.

Tabel II-2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN

No.	Indikator	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Ket/kriteria
					Satuan	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Skor PPH Ketersediaan	Skor PPH Ketersediaan		IKU	Nilai	86	88	88,5	89	87,64	88,05	88,77	89,02	89	89,1	Dapat mengetahui keberagaman ketersediaan bahan pangan yaitu ketersediaan energi dan protein
2.	Skor PPH Konsumsi	Skor PPH Konsumsi		IKU	Nilai	82	83	84	85	82,00	83,7	84,2	85,09	85,1	85,2	Dapat mengetahui pola konsumsi masyarakat yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu
	Tingkat Kemanan Pangan	Tingkat Kemanan Pangan		IKU	%	sedang	tinggi	tinggi	tinggi	sedang	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	Untuk mengetahui kondisi pangan segar yang kemungkinan ada cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia

No.	Indikator	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Ket/kriteria
					Satuan	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.	Stabilitas Harga	Stabilitas Harga		IKU												
	- beras				%	10	10	10	10	3,13	1,53	1,78	2,95	10,00	10,00	Data dan informasi harga beras yang dikumpulkan sebagai bahan membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan
	- cabe				%	25	25	25	25	22,80	16,76	18,85	32,74	25,00	25,00	Data dan informasi harga cabe yang dikumpulkan sebagai bahan membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan
	- bawang				%	10	25	25	25	17,25	12,08	11,08	16,64	25,00	25,00	Data dan informasi harga bawang yang dikumpulkan sebagai bahan membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan
	Stabilitas Pasokan	Stabilitas Pasokan		IKU	%	77	77	77	77	79,00	79,00	79,00	79,00	-	-	Data dan informasi pasokan beras yang dikumpulkan sebagai bahan membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan

Payakumbuh, Agustus 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama daerah dan terkait dengan isu strategis nasional sesuai dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan adalah :

1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Ketahanan pangan pada tataran nasional, merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumberdaya lokal. Terkait definisi tersebut, maka permasalahan ketersediaan dan kerawanan pangan dihadapkan pada :

- a. Produksi dan kapasitas produksi pangan Kota Payakumbuh semakin terbatas, karena:
 - 1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian;
 - 2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan;
 - 3) tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang;
 - 4) masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen (Lossis) pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan pasca panen, yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan;
 - 5) tidak terealisasinya harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;
 - 6) terbatasnya dukungan permodalan di kelurahan;
 - 7) lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi;

- 8) masih berlanjutnya pemotongan ternak betina produktif sebagai sumber protein hewani;
- 9) adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak, sehingga mengganggu upaya peningkatan produktivitas; serta
- 10) masih terbatasnya manajemen kelembagaan tani
- b. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan berkembangnya penggunaan pangan seiring maraknya perkembangan pariwisata, hotel, dan rumah makan/restoran.
 - c. Adanya persaingan penggunaan bahan pangan untuk bio energy dan pakan ternak.
 - d. Kerawanan pangan, karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat miskin, dan sering terjadinya bencana alam.
 - e. Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program
 - f. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastuktur serta kemampuan SDM tenaga pendamping dan penyuluh lapangan.
 - g. Penyediaan hasil analisis, peta kerawanan pangan serta hasil kajian
 - h. Hasil kajian akses pangan belum ditindaklanjuti dengan kegiatan intervensi sehingga bila terjadi masalah yang berkaitan dengan akses tersebut belum bisa dilakukan upaya pemecahannya secara optimal.

- i. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai instrumen isyarat dini (*early warning system*) pencegahan kerawanan pangan belum optimal dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

2. Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi. Beberapa permasalahan terkait dengan aspek distribusi, yaitu belum memadainya prasarana dan sarana distribusi untuk menghubungkan lokasi produsen dengan konsumen di seluruh wilayah yang menyebabkan kurang terjaminnya kelancaran arus distribusi pangan. Hal ini dapat menghambat akses fisik dan berpotensi memicu kenaikan harga, sehingga dapat menurunkan kualitas konsumsi pangan. Ketidaklancaran proses distribusi juga merugikan produsen, karena di samping biaya pemasaran yang mahal, hasil pertanian merupakan komoditi yang mudah susut dan rusak. Selain itu, ketidakstabilan harga memberatkan petani. Dengan sifat produksi yang musiman, penurunan harga pada saat panen cenderung merugikan petani. Sebaliknya, pada saat tertentu, harga pangan meningkat dan menekan konsumen, tetapi peningkatan harga tersebut tidak banyak dinikmati para petani sebagai produsen.

Permasalahan lainnya adanya pengaruh melonjaknya harga pangan dunia, misalnya beras dan kedelai sebagai akibat kenaikan harga di dalam negeri karena ketergantungan terhadap ekspor pangan. Permasalahan dalam proses distribusi pangan antara lain adalah terbatasnya dan/atau kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi, kondisi iklim yang tidak menentu (akibat kondisi musim hujan yang tidak bersahabat, sehingga banyak jalan yang rusak, karena bencana banjir, atau longsor) yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berdampak terhadap melonjaknya ongkos angkut. Konsekuensi dari

ongkos angkut yang tinggi akan berdampak terhadap harga pada tingkat konsumen akan melonjak. Sebaliknya, harga pada tingkat produsen akan jatuh. Tingginya harga pangan mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara ekonomi menurun. Maka kondisi ketahanan pangan tentu terganggu.

Lamanya waktu tempuh dalam pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan transportasi, baik karena kondisi infrastruktur jalan maupun cuaca, akan memperbesar persentase bahan pangan yang rusak. Masalah kelangkaan pangan di suatu wilayah berdampak terhadap harga-harga pangan akan melambung sangat tinggi yang berakibat pada terlampauinya tingkat inflasi dari tingkat inflasi yang telah ditetapkan.

Walaupun pemerintah telah menjamin kecukupan stok beras, namun kecukupan stok pangan tersebut tidak dapat menjamin stok pangan di pasar cukup sehingga jika stok di pasar tidak cukup maka akan berdampak terhadap harga pangan di pasar dapat membumbung tinggi.

3. Penganekaragaman, Pola Konsumsi Pangan, dan Keamanan Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, antara lain:

keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga;

- 1) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi;
- 2) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

- 3) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima;
- 4) adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum;
- 5) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Sampai saat ini, pembinaan dan sosialisasi panganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan diakui masih belum optimal, yang ditandai oleh :

- a) keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal;
- b) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
- c) dukungan sosialisasi, promosi dalam panganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas dan
- d) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit, telah terjadi di berbagai daerah bahkan tergolong sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Kasus-kasus pangan hewani yang terkena wabah penyakit antraks, penyakit flu burung, beredarnya bahan makanan dan minuman olahan tanpa izin edar serta melanggar ketentuan batas

kadaluarsa, dan penggunaan bahan tambahan pangan terlarang, dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian.

Hasil pemantuan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, antara lain:

- a) kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar;
- b) belum dipahami dan diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar;
- c) belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan tambahan pengawet;
- d) masih buruknya praktek-praktek sanitasi dan higiene dalam produksi;
- e) belum adanya ketentuan teknis tentang kewajiban peritel untuk menerapkan Good Ritel Practices (GRP);
- f) masih rendahnya kesadaran para ritel untuk menjual produk segar yang aman dan bermutu;
- g) belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas;
- h) terbatasnya laboratorium yang telah terakreditasi;
- i) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar;
- j) standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk ke dalam negeri;
- k) belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar;

- l) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal; dan
- m) kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

4. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan

Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan sebagai aspek non teknis, merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Berbagai permasalahan yang dihadapi perlu ditanggulangi secara terkoordinasi, antara lain:

- a. Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah masih rendah tentang kelembagaan yang menangani ketahanan pangan sebagai Unit Kerja belum seperti yang diinginkan, dan belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya.
- b. Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang dibentuk di Provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki keseragaman nomenklatur, sehingga penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan belum optimal.
- c. Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah Kota Payakumbuh belum optimal untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan.
- d. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah daerah belum dilakukan secara berkesinambungan.
- e. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan kurang optimal sehingga masih perlu ditingkatkan,
- f. Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program,

- g. Tersedianya teknologi komunikasi dan informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program,
- h. Belum terlaksananya kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD mengakomodir Program Kegiatan yang sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026 dan sesuai dengan Kepmendagri 050 Tahun 2021 serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023. Dari Rancangan awal tersebut, masih banyak yang belum terakomodir kebutuhan Dinas, di sisi lain ada kegiatan yang dirasa tidak memerlukan dana yang besar tapi dialokasikan dengan dana yang cukup besar begitu juga sebaliknya. Untuk itu telah dilakukan review kembali dengan menambahkan catatan penting yang dapat dilihat pada Tabel II.3 di lampiran Renja ini.

Untuk Program dan Kegiatan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 sudah sesuai hanya besaran nya yang masih belum cocok.

Tabel II-3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.302.223.432	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.522.823.182	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM	85,5	2.701.487.482	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM	85,5	2.791.487.482	
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase capaian kinerja program/kegiatan	85%	22.112.400	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase capaian kinerja program/kegiatan	85%	22.112.400	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok	14.426.250	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok	14.426.250	
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dok	7.686.150	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dok	7.686.150	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	90%	2.222.645.860	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	90%	2.222.645.860	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 org	2.083.708.210	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 org	2.083.708.210	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	136.696.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	136.696.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 laporan	2.241.650	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 laporan	2.241.650	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100%	35.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100%	35.000.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	38 paket	25.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	38 paket	25.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.302.223.432	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.522.823.182	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM	85,5	2.701.487.482	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM	85,5	2.791.487.482	
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase capaian kinerja program/kegiatan	85%	22.112.400	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase capaian kinerja program/kegiatan	85%	22.112.400	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok	14.426.250	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dok	14.426.250	
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dok	7.686.150	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dok	7.686.150	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	90%	2.222.645.860	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	90%	2.222.645.860	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 org	2.083.708.210	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 org	2.083.708.210	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	136.696.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	136.696.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 laporan	2.241.650	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 laporan	2.241.650	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100%	35.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100%	35.000.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	38 paket	25.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	38 paket	25.000.000	

	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	1 dok	10.000.000	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	1 dok	10.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan umum sesuai standar	85%	192.393.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan umum sesuai standar	85%	227.393.500	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 paket	1.613.150	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 paket	1.613.150	
	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	52 jenis	13.526.000	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	52 jenis	13.526.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	8.862.150	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	8.862.150	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 paket	8.392.200	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 paket	8.392.200	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 laporan	5.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	155.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	190.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	85%	55.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	85%	110.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	25.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	25.000.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	-	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	30.000.000	Pembelian meja kerja
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	20.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	20.000.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	10.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	10.000.000	

	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	-	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	25.000.000	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah sesuai standar	85%	62.937.972	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase layanan penunjang urusan pemerintah sesuai standar	85%	62.937.972	
	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1.494.500	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1.494.500	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 laporan	1.122.280	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 laporan	1.122.280	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	60.321.192	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	60.321.192	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85%	111.397.750	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85%	111.397.750	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	39.190.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	39.190.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	64.900.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	64.900.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 paket	7.307.750	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 paket	7.307.750	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Persentase cadangan pangan yang tersedia (masy+pemda)	52%	15.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Persentase cadangan pangan yang tersedia (masy+pemda)	52%	15.000.000	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		%cadangan pangan masyarakat	16%	15.000.000	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		%cadangan pangan masyarakat	16%	15.000.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	2 kali	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	2 kali	15.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		- % masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standat AKE - Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan harga pangan	- 61,5 % - 57,5%	430.735.950	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		- % masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standat AKE - Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan harga pangan	- 61,5 % - 57,5%	517.735.950	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi dan Neraca Harga Pangan		- % Pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan - Persentase informasi harga yang up to date	- 17% - 100%	110.500.000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi dan Neraca Harga Pangan		- % Pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan - Persentase informasi harga yang up to date	- 17% - 100%	120.500.000	
	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan		- Jumlah laporan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 laporan	20.000.000	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan		- Jumlah laporan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 laporan	20.000.000	
	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan		Jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	1 dokumen	33.000.000	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan		Jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	1 dokumen	33.000.000	
	Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan		Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	2 unit	6.000.000	Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan		Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	2 unit	6.000.000	
	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia		Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani yang dikembangkan	5 unit	1.500.000	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia		Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani yang dikembangkan	5 unit	1.500.000	
	Peningkatan ketahanan pangan keluarga		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	100 keluarga	50.000.000	Peningkatan ketahanan pangan keluarga		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	100 keluarga	60.000.000	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		- Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	- 64%	77.000.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		- Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	- 64%	117.000.000	
	Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota yang diadakan	3 ton	52.000.000	Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota yang diadakan	3 ton	52.000.000	

	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota	3 kali	25.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota	3 kali	65.000.000	Rancangan Perubahan Perda Cadangan Pangan
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		- persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan - persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu	- 43% - 21%	243.235.950	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		- persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan - persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu	- 43% - 21%	280.235.950	
	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun		Jumlah dokumen Target konsumsi pangan per kapita per tahun	1 dok	26.124.850	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun		Jumlah dokumen Target konsumsi pangan per kapita per tahun	1 dok	26.124.850	
	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal		Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	159.242.450	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal		Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	181.242.450	KWT Rempah, Kelurahan B2SA
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	1 Laporan	57.868.650	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	1 Laporan	72.868.650	Gelar Pangan Lokal
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Skor PPH Ketersediaan	89,10	105.000.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Skor PPH Ketersediaan	89,10	115.000.000	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		- Persentase peningkatan hasil pemanfaatan pekarangan	- 18%	80.000.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		- Persentase peningkatan hasil pemanfaatan pekarangan	- 18%	90.000.000	
	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	25.000.000	
	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kab/kota		Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	55.000.000	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kab/kota		Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	65.000.000	Bantuan KK rawan stunting

	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait	50%	25.000.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait	50%	25.000.000	
	Penyusunan , pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan		Peta dan analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	1 dok	25.000.000	Penyusunan , pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan		Peta dan analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	1 dok	25.000.000	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	90%	50.000.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	90%	83.599.750	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan	- 18%	50.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan	- 18%	83.599.750	
	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota		Kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota yang dibina	1 dokumen	35.000.000	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota		Kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota yang dibina	1 dokumen	48.599.750	Pojok Uji Pangan
	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	15.000.000	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	35.000.000	Rekomendasi PSAT PDUK

Payakumbuh, Agustus 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang Kecamatan untuk Dinas Ketahanan Pangan ada 1 (satu) usulan yaitu dari Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang, yaitu Bantuan pangan bergizi untuk keluarga rawan stunting.

Adapun usulan tersebut dapat diterima dengan jumlah sesuai hasil peninjauan / verifikasi lapangan dan jumlah dana yang tersedia.

Usulan melalui Pokok Pikiran atau dari Pemangku Kepentingan tidak ada. Sedangkan usulan melalui Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, tidak ada usulan Program Kegiatan dari para *stakeholder*. Akan tetapi pada dasarnya para stakeholder mendukung setiap Program Kegiatan yang dilakukan Dinas apabila dialokasikan untuk mereka.

Tabel II-4 A
Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023 Dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Ketahanan Pangan

Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023					Kegiatan sesuai Renja SKPD Tahun 2024		
NO	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kel)	Indikator Kinerja	Vol	Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2023	Pagu Indikatif Tahun 2023	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bantuan pangan bergizi untuk keluarga rawan stunting	Sawah Padang Aua Kuniang Kec. Payakumbuh Selatan	Skor PPH Ketersediaan	252 KK	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kab/kota	Rp. 55.000.000	Dapat diterima dengan jumlah sesuai hasil peninjauan dan jumlah dana yang tersedia

Payakumbuh, Agustus 2023
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

Tabel II-4 B
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Ketahanan Pangan

NO	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi (Kel)	Indikator Kinerja	Besaran / Vol	Catatan
1	2	3	4	5	8
	NIHIL				

Payakumbuh, Agustus 2023
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 KOTA PAYAKUMBUH



EDVIDEL ARDA, S.IP
 NIP. 19700124 199003 1 001

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan terhadap pembangunan ketahanan pangan di daerah, yang menyatakan bahwa pembangunan ketahanan pangan menjadi program prioritas yang utama. Arah pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada hasil KTT Pangan 2009, yang antara lain menyepakati untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang mendesak pada tingkat nasional, regional dan global untuk merealisasikan secara penuh komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2000 dan Deklarasi *World Food Summit* (WFS) 1996, untuk mengurangi penduduk dunia yang menderita lapar dan malnutrisi.

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional dan kesepakatan KTT pangan, arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan nasional adalah untuk:

1. Meningkatkan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan;
2. Meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga dan cadangan pangan;
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan untuk:

1. Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam daerah menuju kemandirian pangan;
2. Mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis;
3. Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan kerawanan pangan.

Dalam aspek peningkatan sistem distribusi, stabilitasi harga dan cadangan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

- 1) Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan;
- 2) Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif;
- 3) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan
- 4) Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan.

Sedangkan pada aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

1. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal;
2. Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial;
3. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar;
4. Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain:

- a) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan;
- b) peningkatan kerjasama dengan mitra kerja,
- c) peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d) penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta
- e) dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

1. Tujuan

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Ketahanan Pangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan adalah:

- 1. Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan
- 2. Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

3. Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050/ 2021 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pemabngunan dan keuangan daerah

Program ,kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2024 adalah :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Target Capaian Program : Nilai IKM 85

Kegiatan :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Sub Kegiatan
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan
 - a. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai

4. Administrasi Umum

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- b. Penyediaan bahan logistik kantor
- c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- e. Fasilitasi kunjungan tamu
- f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan
- c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

**B. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI
UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**

Target Capaian Program :

- % Cadangan pangan yang tersedia (masyarakat dan Pemerintah daerah) 52%

Kegiatan :

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan daerah Kabupaten/kota

Sub kegiatan :

1. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik

**C. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**

Target Capaian Program :

- % masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE 61,5%
- Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan 57,5%

Kegiatan :

1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan

Sub Kegiatan :

- a. Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia
- b. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- c. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan Kab/Kota

- d. Penyediaan informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kab/Kota
- e. Pemantauan harga dan pasokan pangan
- f. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
- 2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan cadangan pangan pemerintah Kab/Kota
 - b. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kab/Kota
- 3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita/tahun
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis Sumber Daya Lokal
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita/tahun

D. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Target Capaian Program : Skor PPH Ketersediaan 89,10

Kegiatan :

- 1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan, pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
- 2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kab/kota

E. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Kegiatan :

- 1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segardaerah Kabupaten/Kota
- b. Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota

Tabel III-1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN
MAJU TAHUN 2025

No	Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PANGAN				3.407.382.772	DAU			3.798.990.338
	DINAS KETAHANAN PANGAN				3.407.382.772				3.798.990.338
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Payakumbuh		2.761.198.848				2.919.754.388
2.09.01.2.01.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai IKM		85,5	22.112.400	DAU		86	23.932.400
2.09.01.2.01.07	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		3 dok	14.426.250	DAU		3 dok	15.246.250
2.09.01.2.02	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		6 dok	7.686.150	DAU		6 dok	8.686.150
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas		90%	2.281.095.836	DAU		90%	2.296.092.766
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		20 org	2.142.158.186	DAU		20 org	2.157.155.116
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 dok	136.696.000	DAU		12 dok	136.696.000

*Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh*

2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		12 laporan	2,241,650	DAU		12 laporan	2,241,650
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian		100%	35,000,000	DAU		100%	60,000,000
2.09.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		38 paket	25,000,000	DAU		38 paket	35,000,000
2.09.01.2.05.05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja		1 dok	10,000,000	DAU		1 dok	25,000,000
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum sesuai standar		85%	193,654,890	DAU		85%	243,393,500
2.09.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		9 paket	1,613,150	DAU		9 paket	1,613,150
2.09.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		52 jenis	13,526,000	DAU		52 jenis	18,526,000
2.09.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		4 paket	8,862,150	DAU		4 paket	9,862,150
2.09.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		2 paket	8,392,200	DAU		2 paket	8,392,200

2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		5 laporan	5,000,000	DAU		5 laporan	10,000,000
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100 laporan	156,261,390	DAU		100 laporan	195,000,000
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik		85%	55,000,000	DAU		85%	120,000,000
2.09.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan		1 unit	25,000,000	DAU		1 unit	25,000,000
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		1 paket	-	DAU		1 paket	30,000,000
2.09.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		1 unit	20,000,000	DAU		1 unit	20,000,000
2.09.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 unit	10,000,000	DAU		1 unit	20,000,000
2.09.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 unit		DAU		1 unit	25,000,000
2.09.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah sesuai standar		85%	62,937,972	DAU		85%	62,937,972

2.09.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		1 Laporan	1,494,500	DAU		1 Laporan	1,494,500
2.09.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		2 laporan	1,122,280	DAU		2 laporan	1,122,280
2.09.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1 Laporan	60,321,192	DAU		1 Laporan	60,321,192
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		85%	111,397,750	DAU		85%	113,397,750
2.09.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		1 unit	39,190,000			1 unit	39,190,000
2.09.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		10 unit	64,900,000	DAU		10 unit	64,900,000
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		3 paket	7,307,750	DAU		3 paket	9,307,750
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan yang tersedia (masy+pemda)		52%	15,000,000			53%	25,000,000

2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%cadangan pangan masyarakat		16%	15,000,000	DAU		17%	25,000,000
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik		2 kali	15,000,000	DAU		2 kali	25,000,000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	- % masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standat AKE - Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan kases pangan		- 61,5 % 57,5%	- 447,285,974	DAU		- 62 % - 58%	589,235,950
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	- % Pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan - Persentase informasi harga yang up to date		- 17% 100%	- 120,500,000	DAU		- 18% - 100%	189,000,000
2.09.03.2.01.01	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	- Jumlah laporan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan		2 laporan	20,000,000	DAU		2 laporan	30,000,000
2.09.03.2.01.04	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan		1 dokumen	33,000,000	DAU		1 dokumen	53,000,000
2.09.03.2.01.05	Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan		2 unit	6,000,000	DAU		2 unit	16,000,000

2.09.03.2.01.06	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani yang dikembangkan		5 unit	1,500,000	DAU		5 unit	15,000,000
2.09.03.2.01.07	Peningkatan ketahanan pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga		100 keluarga	60,000,000	DAU		100 keluarga	75,000,000
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	- Persentase cadangan pangan pemerintah daerah		- 64%	68,550,024	DAU		- 64%	127,000,000
2.09.03.2.02.03	Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota yang diadakan		3 ton	43,550,024	DAU		3 ton	82,000,000
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota		3 kali	25,000,000	DAU		3 kali	45,000,000
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	- persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan - persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu		- 43% - 21%	258,235,950	DAU		- 44% - 22%	273,235,950
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Jumlah dokumen Target konsumsi pangan per kapita per tahun		1 dok	4,124,850	DAU		1 dok	36,124,850

2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal		1 Laporan	181,242,450	DAU		1 Laporan	179,242,450
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun		1 Laporan	72,868,650	DAU		1 Laporan	57,868,650
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor PPH Ketersediaan		89.10	105,000,000	DAU		89.20	185,000,000
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Persentase peningkatan hasil pemanfaatan pekarangan		- 18%	80,000,000			- 19%	150,000,000
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota		2 Laporan	25,000,000			2 Laporan	25,000,000
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kab/kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	55,000,000			1 dokumen	125,000,000
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait		50%	25,000,000			50%	125,000,000

2.09.04.2.01.01	Penyusunan , pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan		1 dok	25.000.000			1 dok	35.000.000
2.9.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi		90%	78.897.950			90%	80.000.000
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan		- 18%	78.897.950			- 19%	80.000.000
2.09.05.2.01.01	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota yang dibina		1 dokumen	48.599.750			1 dokumen	45.000.000
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	30.298.200			1 dokumen	35.000.000

Payakumbuh, Agustus 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

4.1. Rencana Kerja

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada tahun 2024 sesuai dengan visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan permasalahan dan potensi ketahanan pangan; adalah 1 (satu) Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** ditambah 4 (empat) program yaitu **Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan** , **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, **Program Penanganan Kerawanan Pangan** dan **Program Pengawasan Keamanan Pangan**.

Sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

Dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan berpatokan kepada target yang harus dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan, Sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050/ 2021 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

Adapun Rencana Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Target Capaian Program : Nilai IKM 85

Kegiatan :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub Kegiatan

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Sub kegiatan ini berupa penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang terdiri dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) awal dan Rencana Kerja (Renja) perubahan, dokumen RKA dengan target sebanyak 3 dokumen. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.170.050.

- b. Evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub kegiatan ini berupa penyusunan dokumen evaluasi kinerjaperangkat daerah yang terdiri dari LKJiP, LKPJ, Evaluasi Renja Triwulan 1,2,3 dan 4 , SAKIP dengan target sebanyak 6 dokumen.

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.685.950,-

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dengan target 23 orang Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.142.158.513,-

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan ini berupa pembayaran jasa pengelola administrasi keuangan kantor dengan terget 17 orang. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 129.312.000,-

c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

Sub kegiatan ini berupa penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dengan target sebanyak 3 dokumen. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.417.250,-

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

a. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai

Sub kegiatan ini berupa monev terhadap ASN Dinas Ketapang terhadap kinerjanya. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.997.400,-

4. Administrasi Umum

Sub Kegiatan

a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Sub kegiatan ini berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.611.000,-

b. Penyediaan bahan logistik kantor

Sub kegiatan ini berupa penyediaan bahan logistik kantor yaitu alat tulis kantor (ATK) dengan target 52 jenis. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.254.200,-

c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Sub Kegiatan ini berupa penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target 4 paket. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.251.000,-

d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Sub kegiatan ini berupa penyediaan surat kabar dan majalah dengan target sebanyak 2 media yaitu Padang Ekspres dan Singgalang. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.390.400,-

e. Fasilitas kunjungan tamu

Sub kegiatan ini berupa makan minum serta cendramata untuk tamu yang dating. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-

f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat bagi PNS Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam rangka mengikuti rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
156.269.000,- .

5. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Sub kegiatan ini berupa pembelian benda pos yaitu materai
10.000. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
1.483.500,-

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Sub kegiatan ini berupa penyediaan jasa telekomunikasi, air
dan listrik sebanyak 1 rek. Dilaksanakan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 100.740,- .

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini berupa penyediaan jasa pelayanan umum
kantor (supir) dengan target sebanyak 2 orang .
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
60.458.052,-

6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan
pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas
jabatan

Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin kendaraan dinas
esselon II yaitu penyediaan BBM, Pembayaran pajak dan
servis sebanyak 1 unit. Dilaksanakan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 39.190.000,-

- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan

Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin kendaraan dinas yang terdiri dari penyediaan BBM, pembayaran pajak dan servis kendaraan roda 2 sebanyak 8 unit, roda 4 sebanyak 2 unit. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.900.000,-

- c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan sarana kantor yaitu dengan target sebanyak 3 unit. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.250.000,-

B. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Target Capaian Program :

- % Cadangan pangan yang tersedia (masyarakat dan Pemerintah daerah) 52%

Kegiatan :

- 1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan daerah Kabupaten/kota

Sub kegiatan :

- 1. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistic

Sub Kegiatan ini berupa pembinaan secara berkala (sekali 3 bulan) terhadap PPK revitalisasi tahun 2023 sebanyak 5 unit. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.025.240,-

C. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Target Capaian Program :

- % masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE 61,5%
- Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan 57,5%

Kegiatan :

1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan

Sub Kegiatan :

- a. Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia

Sub Kegiatan ini berupa pembinaan secara berkala (sekali 3 bulan) terhadap Kelompok Gapoktan Aua Kuniang yang tergabung dalam kelompok Toko Tani Indonesia (TTI). Dilaksanakan dengan anggaran Rp. 500.000,-.

- b. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

Sub Kegiatan ini berupa sosialisasi/pelatihan peningkatan ketahanan pangan keluarga dan pemberian bantuan untuk masyarakat seperti bantuan itik. Dilaksanakan dengan anggaran Rp. 52.240.340,-

- c. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan Kab/Kota

Sub Kegiatan ini berupa pembinaan terhadap kelompok LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat). Dilaksanakan dengan anggaran Rp. 500.000,-

- d. Penyediaan informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kab/Kota

Sub Kegiatan ini berupa penyebarluasan informasi harga di Radio Safasindo dan pembuatan buku analisa perkembangan harga pangan. Dilaksanakan dengan anggaran Rp. 17.127.360,-

e. Pemantauan harga dan pasokan pangan

Sub Kegiatan ini berupa pemantauan terhadap harga pangan setiap hari nya dan pasokan pangan yang ada di kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 26.159.764,-

f. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Sub Kegiatan ini berupa pembuatan buku Neraca Bahan Makanan (NBM). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 4.707.360,-

2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan cadangan pangan pemerintah Kab/Kota

Sub Kegiatan ini berupa pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah melalui BULOG. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 50.135.936,-

b. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kab/Kota

Sub Kegiatan ini berupa koordinasi dengan BULOG , rapat-rapat serta sosialisasi. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 23.453.750,-

3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita/tahun

Sub Kegiatan ini berupa Pembuatan buku Skor PPH Konsumsi yang datanya kita dapatkan dari data Badan Pusat Statistik berupa data sekunder dan dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan aplikasi yang sudah dimutakirkan oleh Bapanas, sebelum pengolahan dan analisis data dilakukan Bimtek oleh Bapanas terhadap petugas pengolah data dan pejabat yang menganalisis data, Hasil data yang didapatkan nanti akan dikomunikasikan didalam rapat dinas dan rapat lintas sektoral dengan OPD terkait. Dilaksanakan dengan anggaran Rp. 4.255.900,-

- b. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis Sumber Daya Lokal

Sub Kegiatan ini berupa pelatihan pangan lokal Yang bekerjasama dengan SMK3 Payakumbuh terkait dengan nara sumber, Resep snack pangan lokal non beras non terigu untuk dikonsumsi oleh balita stunting yang diikuti oleh 6 Kelurahan dengan masing masing peserta 10 orang perkelurahan yang merupakan kader pos gizi dari kelurahan , Sosialisasi konsumsi pangan lokal 30 orang berasal dari 15 kelurahan yang memiliki angka anak stunting tertinggi, Sosialisasi B2SA (beragam bergizi seimbang dan aman) untuk 30 orang kader dikelurahan yang angka stunting tertinggi, Sosialisasi konsumsi pangan lokal untuk anak sekolah sebanyak 10 sekolah SMA untuk remaja berisiko stunting, Gelar pangan lokal saat Ulang Tahun Kota Payakumbuh 2024 dengan menyediakan 800 snack

gratis untuk masyarakat, Pembuatan Roll Banner terkait Konsumsi pangan lokal dan Konsumsi B2SA yang diserahkan kepada kelurahan yang kita berikan pelatihan pangan lokal, Leaflet terkait konsumsi pangan lokal dan Konsumsi B2SA diberikan pada Kelurahan dan Sekolah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 155.204.200,-

- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita/tahun

Sub Kegiatan ini berupa Lomba-lomba yang diikuti oleh Dinas Ketahanan Pangan diantaranya Lomba Ketahanan Pangan (APN), Lomba Peringatan Hari Pangan Sedunia, Lomba Pengolahan pangan local non beras non terigu, Lomba cipta menu tingkat kota dan tk provinsi diikuti oleh 10 Kelurahan utusan juara 1 dan 2 lomba di Kecamatan. Dilaksanakan dengan anggaran Rp. 71.377.420,-

D. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Target Capaian Program : Skor PPH Ketersediaan 89,10

Kegiatan :

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan, pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Sub Kegiatan ini berupa Penyusunan laporan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) dan penyusunan laporana

peta FSVA. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 80.000.750,-

2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini berupa Pembinaan kepada kelompok Desa Mandiri Pangan yang ada di Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 4.205.895,-

- b. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kab/kota

Sub Kegiatan ini berupa pemberian bantuan kepada Kepala Keluarga yang memiliki Balita rawan gizi . Adapun bantuan berupa susu, telur atau bahan pangan lainnya. Dilaksanakan dengan anggaran Rp. 54.993.432,-

E. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Target Capaian Program : Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi 90%

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segardaerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini berupa Melakukan uji sampel terhadap pangan segar terhadap uji residu pestisida sebanyak 20 sample sayur dan buah serta 18 sample

uji residu logam pada beras yang dihasilkan oleh RMU (Rice Milling Unit) yang Dinas Ketahanan Pangan Rekomendasikan keluar no registrasi PSAT PDUK , serta Temu Teknis Penguatan Kelembagaan Pangan yang dihadiri oleh Stakeholder terkait Pengawasan Keamanan Pangan. Dilaksanakan dengan anggaran Rp. 55.731.570,-

- b. Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan ini berupa sosialisasi pangan segar bersertifikasi dan kepada pelaku usaha RMU (Rice Milling Unit) sebanyak 15 diharapkan dari sosialisasi ini RMU yang ada di Kota Payakumbuh teregistrasi di SOS (Sistem Online Submission) sehingga RMU teregistrasi PSAT PDUK , sehingga kalau ada permasalahan terkait keamanan pangan bisa ditelusuri, Sosialisasi Keamanan Pangan bagi 4 Sekolah PAUD dengan menghadirkan orang tua dilokasi Kelurahan berisiko Stunting. Dilaksanakan dengan anggaran Rp. 35.564.800,-

4.2 Pendanaan Indikatif

Program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh 2024 yang dibiayai oleh APBD Kota Payakumbuh, merupakan program prioritas Kota Payakumbuh, dan juga sebagai aktivitas dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2023, jumlah biaya/dana indikatif yang akan diserap Dinas Ketahanan Pangan

Kota Payakumbuh sebesar Rp. 3.330.082.772,- Dengan rincian sebagaimana pada Tabel IV.1 lampiran ini

Tabel IV.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETAHANAN PANGAN						3.330.082.772,00							3.649.240.338,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.330.082.772,00							3.649.240.338,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						3.330.082.772,00							3.649.240.338,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan	-			85,50 indek	2.683.899.055,00						-	2.764.754.388,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan	-			85 %	24.856.000,00			Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	-	23.932.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	17.170.050,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		15.246.250,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	7.685.950,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		8.686.150,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas	-			90 %	2.279.887.763,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	-	2.296.092.788,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.142.158.513,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		2.157.155.116,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	129.312.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		136.696.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	8.417.250,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		2.241.650,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan kepegawaian	-			100 %	9.997.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	-	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	9.997.400,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum Sesuai Standar	-			85 %	195.775.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	-	243.393.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	1.611.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		1.613.150,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

Activ

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				52 Paket	16.254.200,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		18.526.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	8.251.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		9.862.150,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	8.390.400,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		8.392.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	156.269.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		195.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Sesuai Standar	-			85 %	62.042.292,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	-	62.937.972,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.483.500,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		1.494.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	100.740,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		1.122.280,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	60.458.052,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		60.321.192,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	-			85 %	111.340.000,00			Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan	-	113.397.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39.190.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		39.190.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	64.900.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkata n kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		64.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3 Unit	7.250.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		9.307.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	<i>Persentase cadangan pangan yang tersedia (Masyarakat+Pemda)</i>	-			52,00 %	10.025.240,00						-	25.000.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Cadangan Pangan Masyarakat</i>	-			16 %	10.025.240,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saling berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02.2.01.0004		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik														
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik</i>				2 Laporan	10.025.240,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saling berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	<i>Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan</i>	-			61,50 % 57,50 %	405.662.030,00						-	594.485.950,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<i>1. Persentase Pengembangan Usaha Kelembagaan Distribusi Pangan 2. Persentase Informasi Harga yang Up to Date</i>	-			17 % 100 %	101.234.824,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saling berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	194.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0006		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				5 Unit	500.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perumahan yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	52.240.340,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perumahan yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota														
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				2 Unit	500.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perumahan yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		16.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				1 Laporan	17.127.360,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perumahan yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				1 Dokumen	26.159.764,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		53.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	4.707.360,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		5.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	-			64 %	73.589.686,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	127.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				3 Ton	50.135.936,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		82.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				3 Ton	23.453.750,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku a Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkata n Perekono mian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Diversifikasi Konsumsi Pangan 2. Persentase Masyarakat yang telah Terampil dalam Mengolah Pangan Lokal Non Beras Non Terigu	-			43 % 21 %	230.837.520,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	273.235.950,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	4.255.900,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh		36.124.850,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	155.204.200,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh		179.242.450,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														

Activ

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	71.377.420,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh		57.888.650,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor PPH ketersediaan	-			89,10 skor	139.200.077,00						-	185.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait	-			50 %	80.000.750,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkesdilan	Peningkatan Perumahan yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	80.000.750,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkesdilan	Peningkatan Perumahan yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Hasil Pemanfaatan Pekanbaru	-			18 %	59.199.327,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkesdilan	Peningkatan Perumahan yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	54.993.432,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				2 Laporan	4.205.895,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Perlu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	-			90,00 %	91.296.370,00						-	80.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang Memahami Zat Berbahaya bagi Pangan	-			18 %	91.296.370,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh	-	80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	35.564.800,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh		35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	55.731.570,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh		45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	JUMLAH							3.330.082.772,00							3.649.240.338,00	

Untuk Tahun 2024 usulan untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 Kota Payakumbuh dengan sumber dana APBN/APDB Propinsi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV-2
USULAN PROGRAM / KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL SUMBER DANA APBN TA 2024

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

NO	PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	OUTPUT (PROYEK) K/L	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	TARGET*	USULAN PAGU (Rp)	LOKASI		KET.
								PROVINSI	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NIHIL									
TOTAL										

Payakumbuh, Agustus 2023
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

BAB V PENUTUP

Secara umum isi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kerja dan kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023-2026 dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan pembangunan ketahanan pangan sampai saat ini harus dapat terus ditingkatkan untuk kegiatan tahun berikutnya, sejalan dengan makin mantapnya pemahaman tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan serta seiring dengan budaya kerja profesional yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas dan kualitas hasil kerja.

Menyadari bahwa kemampuan sumber daya yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan sangat terbatas terutama kuantitas personil, maka guna mewujudkan agar tercapainya sasaran pembangunan ketahanan pangan sangat diperlukan dukungan berbagai pihak terutama stake holder terkait baik pemerintah maupun swasta, dan yang tidak kalah penting adalah adanya peran serta aktif dari masyarakat.

Payakumbuh, Agustus 2023
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.9.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	91.296.370	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	91.296.370	91.296.370										
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	91.296.370	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	91.296.370	91.296.370										
2.09.05.2.01.01	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	55.731.570	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	55.731.570	55.731.570										
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	35.564.800	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	35.564.800	35.564.800										

Payakumbuh, Agustus 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

DRAFT RUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TA 2024

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja	OPD Perumus
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		mengacu pada RPD				
X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		mengacu pada renstra				Bappeda
X.XX.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Melakukan rangkaian aktivitas dalam memenuhi tahapan dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah (Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah) yakni tahapan persiapan (termasuk penyusunan SK Tim, Pelaksanaan Orientasi), tahapan rancangan, tahapan Forum Perangkat Daerah, tahapan rancangan akhir dan penetapan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	Disarankan untuk digunakan tiap OPD. Untuk efisiensi, indikator dapat ditambahkan/ digabungkan dengan penyusunan dokumen RKA, PRKA, DPA, PDPA	B. mami, B. ATK, B. cetak/jilid. B. SPANDUK	Bappeda
		Jumlah dokumen penganggaran yang disusun	dokumen			
X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD meliputi pelaksanaan rapat-rapat diinternal SKPD atau pelaksanaan koordinasi lainnya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		Bappeda
X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan dokumen Perubahan RKA SKPD sebagai akibat adanya perubahan kebijakan.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		Bappeda
X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan dokumen DPA SKPD sebagai pedoman dalam penganggaran program dan kegiatan yang akan disahkan melalui peraturan daerah.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		Bappeda
X.XX.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan Perubahan DPA SKPD yang akan disahkan melalui peraturan daerah.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		Bappeda
X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD selama 1 tahun kinerja termasuk juga LAKIP, LPPD dan LKPJ	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		Bappeda
X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	rangkaian kegiatan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja tahunan perangkat daerah termasuk pelaksanaan rapat-rapat internal Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang sedang atau telah dilaksanakan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	Disarankan untuk digunakan tiap OPD. Untuk efisiensi, indikator dapat digabungkan dengan	B. mami, B. ATK, B. cetak/jilid. B.	Bappeda
X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		mengacu pada renstra				BKD

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja	OPD Perumus
X.XX.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan ini merupakan penyediaan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN dan calon ASN serta jaminan pemeliharaan kesehatan ASN dan calon ASN, serta insentif retribusi dan pajak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	wajib dipakai setiap OPD	B. gaji, TPP, insentif. B ATK, FC	BKD
X.XX.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN untuk pembayaran honor pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan honor UKPBJ, honor pengelola keuangan, PPK,PPTK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	wajib dipakai setiap OPD	honor PPTK, PPK, KPA, PA, Pejabat pengadaan, Bendahara, BPP, Pengurus barang, B. ATK, FC	BKD
X.XX.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dimulai dari Penerbitan SPP, SPM, verifikasi dan pengesahan SPJ	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	utk mengakomodir aktivitas perbendaharaan	B. ATK, Mami, cetak, jilid dsb	BKD
X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Melakukan koordinasi dan melaksanakan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	utk mengakomodir aktivitas akuntansi		BKD
		Jumlah laporan akuntansi yang disusun				
X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Melakukan koordinasi dan menyusun Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKD
X.XX.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Menyiapkan bahan tanggapan/tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan aparat pemeriksa internal maupun eksternal	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut pemeriksaan	dokumen	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKD
X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Melaksanakan koordinasi dan menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan dan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKD
X.XX.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Menyusun laporan dan melakukan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKD
X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Penggunaan subkeg pada kegiatan ini dapat dipilih saja yg paling dominan/ digabungkan saja untuk efisiensi		BKD
X.XX.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Pada tingkat SKPD digunakan untuk menghimpun dokumen dari Kuasa Pengguna Barang ke Pengguna Barang (Kepala SKPD)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKD

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja	OPD Perumus
X.XX.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah meliputi pengamanan fisik, administrasi dan hukum (spt tanda batas, dokumen pengamanan hukum/administrasi). Asuransi barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	dapat digunakan beberapa OPD (utk asuransi BMD)		
X.XX.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	kegiatan Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKD
X.XX.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	untuk mendukung Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya (SKPD)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKD
X.XX.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKD
X.XX.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKD
X.XX.01.1.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Merupakan upaya pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan (dapat berupa usulan sewa, usulan pinjam pakai, usulan KSP, BGS/BSG/ KSPI)	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKD
X.XX.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				Penggunaan subkeg pada kegiatan ini dapat dipilih saja yg paling dominan/ digabungkan saja untuk efisiensi (Utk SKPD yg punya pendapatan)		BKD
X.XX.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	kegiatan yang dilakukan untuk menyusun perencanaan pengelolaan retribusi yang merupakan kewenangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKD
X.XX.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kegiatan yang dilakukan untuk menganalisa termasuk pengolahan data retribusi, analisa terkait dengan rencana pengembangan retribusi serta kegiatan-kegiatan dalam rangka penyusunan kebijakan retribusi yang merupakan kewenangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	dokumen	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKD

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja	OPD Perumus
X.XX.01.1.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Serangkaian kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi yang merupakan kewenangan Perangkat Daerah dalam bentuk Sosialisasi atau dalam bentuk penyampaian informasi lainnya kepada semua pihak terkait	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	laporan	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKD
X.XX.01.1.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	serangkaian kegiatan pendataan dan pendaftaran objek retribusi yang merupakan kewenangan Perangkat Daerah antara lain melalui tinjauan lapangan dan pengusulan objek retribusi daerah yang merupakan kewenangan Perangkat Daerah kepada instansi terkait. Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	dokumen	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKD
X.XX.01.1.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Melakukan pengolahan data retribusi yang merupakan kewenangan Perangkat Daerah dengan menggunakan salah satunya data wajib retribusi yang sudah menyetorkan retribusi daerah. Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	laporan	disarankan utk digunakan OPD inner (gabungan perencanaan, pembinaan, pelaksanaan)	B. ATK, Mami, cetak,/FC	BKD
X.XX.01.1.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Melakukan penetapan wajib retribusi daerah yang merupakan kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	dokumen	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKD
X.XX.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Menyusun laporan pengelolaan retribusi antara lain melalui rapat-rapat koordinasi atau bentuk kegiatan lain	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	disarankan utk digunakan OPD inner (utk pelaopran)		BKD
X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemberhentian PNS dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan perangkat daerah			Penggunaan subkeg pada kegiatan ini dapat dipilih saja yg paling dominan/ digabungkan		BKPSDM
X.XX.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan/pengadaan peralatan yang berfungsi sebagai sarana pengawasan dan peningkatan disiplin PNS	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKPSDM
X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pembelian pakaian dinas beserta atribut kelengkapan bagi ASN yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban pegawai dalam berpakaian dinas sesuai aturan yang berlaku. Jenis pakaian dinas yang bisa diadakan adalah PDH warna khaki, PDH kemeja putih, celana/rok hitam dan PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah) sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah).	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket			BKPSDM
X.XX.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	dapat dipakai oleh dinas dengan ASN yang banyak (DKK, Diknas)		BKPSDM

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja	OPD Perumus
X.XX.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pelaksanaan koordinasi sistem Informasi Kepegawaian ke instansi pusat dan daerah yang bertujuan untuk kesamaan data dan fungsi dari sistem informasi yang dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKPSDM
X.XX.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Melakukan asistensi Penilaian Kinerja dan pengawasan terhadap kepatuhan dan kebenaran pelaksanaan penilaian kinerja PNS berdasarkan PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKPSDM
X.XX.01.1.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pemberian bantuan kepada ASN terkait pemulangan dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	orang	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKPSDM
X.XX.01.1.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian bantuan pemulangan bagi ASN yang meninggal dalam pelaksanaan tugas.	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	laporan	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKPSDM
X.XX.01.1.05.08 Pemindehan Tugas ASN	Pengelolaan Pindah ASN antar bidang/ antar instansi/ antar perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	orang	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi		BKPSDM
X.XX.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan jabatan dan kepentingan organisasi.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	dapat digunakan utk diklat penjenjangan		BKPSDM
X.XX.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk menginformasikan peraturan perundang-undangan pada ASN dan masyarakat.	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	dapat diogunakan utk pelaksanaan sosialisai perda		BKPSDM
X.XX.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemberian pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi ASN yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN terkait peraturan perundang-undangan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang			BKPSDM
X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				Penggunaan subkeg pada kegiatan ini dapat dipilih saja yg paling dominan/ digabungkan		
X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Digunakan untuk pembelian komponen listrik/penerangan kantor (Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (lihat lampiran 1)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket			Dalbang
X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Digunakan untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor (Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (lihat lampiran 2)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	Barang habis pakai		Dalbang
X.XX.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Digunakan untuk pembelian barang/peralatan rumah tangga (Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (lihat lampiran 3)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	batang habis pakai. Jika BM masuk BMD		Dalbang

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja	OPD Perumus
X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Digunakan untuk pembelian bahan logistik kantor (Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (lihat lampiran 4), ex ATK	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket			Dalbang
X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Digunakan untuk Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (fotokopi umum, cetak spanduk, cetak buku di umum)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket			Dalbang
X.XX.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Digunakan untuk Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (koran, ajalah dll)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen			Dalbang
X.XX.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Digunakan untuk pembelian Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (lihat lampiran 5)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	Disarankan tidak digunakan, karena: 1. Untuk Isi Tabung Pemadam Kebakaran dan Tabung Gas, dapat digabungkan dengan sub kegiatan X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 2) Sedangkan BMD lainnya disarankan masuk ke belanja terkait urusan		Dalbang
X.XX.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Serangkaian kegiatan pelayanan kepada tamu mulai dari penyambutan, prosesi / pertemuan sampai tamu meninggalkan tempat	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan			Bappeda
X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan kegiatan menghadiri rapat-rapat berdasarkan undangan dan inisiatif untuk mengkonsultasikan bidang pekerjaan SKPD ke pemerintah daerah lainnya dan pemerintah pusat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	SPPD		Bappeda
X.XX.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kegiatan yang berkaitan dengan penatausahaan dan pengelolaan Arsip Dinas di SKPD (ditunggu dari arsip)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	filing (bisa di subkegiatan perlengkapan ktr) ruang arsip (di subkegiatan rehap gedung). THL		dinas Arsip
X.XX.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	seluruh pembiayaan yang dibutuhkan seperti pembiayaan honor tenaga IT, penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang erat kaitannya guna menjalankan sistem aplikasi pemerintah berbasis elektronik sesuai dengan kebutuhan SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti pengembangan aplikasi/website, penyusunan modul-modul, dokumen rencana/ manajemen SPBE, evaluasi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen			Kominfo
		Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan	orang			
		Jumlah Sarana prasarana yang tersedia	jumlah			
X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja	OPD Perumus
X.XX.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan (Gubernur, Wakil Gubernur; Sekretaris Daerah Provinsi, Pimpinan DPRD)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit			Dalbang
	Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran			{Sedan, Jeep, Station Wagon, Multi Purpose Vehicle (Mpv), dan Sport Utility Vehicle (Suv)}		
X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum (lihat lampiran 6)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit			Dalbang
X.XX.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar	Digunakan untuk pembelian Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (lihat lampiran 7)	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	unit			Dalbang
X.XX.01.1.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Digunakan untuk pembelian Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dengan (lihat lampiran 8)	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	unit			Dalbang
X.XX.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Digunakan untuk pembelian Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (lihat lampiran 9)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket			Dalbang
X.XX.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Digunakan untuk pembelian Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (lihat lampiran 10) ex. Kmputer, PC, peralatan jaringan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Untuk Jenis BMD Peralatan dan Mesin (kodefikasi 1.3.2) diluar lampiran 2, 3, 6, 7, 8, 9 disarankan masuk ke belanja terkait urusan		Dalbang
X.XX.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Digunakan untuk pembelian Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (lihat lampiran 11)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	Disarankan tidak digunakan, karena:		Dalbang
				1. Untuk Buku, dapat digabungkan dengan sub kegiatan X.XX.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
				2. Sedangkan BMD lainnya disarankan masuk ke belanja terkait urusan		

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja	OPD Perumus
X.XX.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Digunakan untuk pembelian Barang Milik Daerah sesuai dengan rincian sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dengan (lihat lampiran 12)	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	unit	Disarankan masuk ke belanja terkait urusan		Dalbang
X.XX.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Digunakan untuk pembangunan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit			Dalbang
X.XX.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Digunakan untuk pengadaan peralatan yang melekat pada gedung (ex, lift, AC central)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit			Dalbang
X.XX.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor dan bangunan lainnya (bangunan pelengkap gedung) ex, garase, pagar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit			Dalbang
X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Serangkaian kegiatan pengadministrasian dan pendistribusian surat-surat masuk dan keluar. Untuk proses surat masuk dimulai dengan pencatatan dan pemberian nomor surat, pendisposisian surat oleh pimpinan sampai pendistribusian kepada pihak terkait. Untuk proses surat keluar dimulai dengan pengajuan draft surat, perbaikan surat dan pemberian paraf surat yang sudah final, sampai surat tersebut ditandatangani pimpinan tertinggi serta di beri nomor dan didistribusikan kepada pihak terkait.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	disarankan tidak dipakai; karna untuk pengadaan kebutuhan kegiatan ini dapat diakomodir pada subkeg logistik		Bappeda
X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kegiatan pembayaran kewajiban setiap bulan untuk biaya telekomunikasi, PDAM dan PLN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			Bappeda
		jumlah rekening air, listrik, internet, tlp/fax yang dibayarkan	rekening			
X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan anggaran untuk pembayaran jasa pihak ketiga atas pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang telah dilakukannya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan			BKD
		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	unit			
X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan anggaran untuk pembayaran jasa pelayanan umum kantor yang diberikan seperti resepsionis, supir, tenaga administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			BKD
		Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang			
X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja	OPD Perumus
X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Digunakan untuk menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit			dalbang
X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Digunakan untuk menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (lihat lampiran 6)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			dalbang
X.XX.01.1.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Digunakan untuk menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar (lihat lampiran 7)	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	unit			dalbang
X.XX.01.1.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Digunakan untuk menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (lihat lampiran 8)	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinanny	unit			dalbang
X.XX.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Digunakan untuk menyediakan Pemeliharaan Mebel (lihat lampiran 9)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit			dalbang
X.XX.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Digunakan untuk menyediakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (lihat lampiran 10)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	Untuk Jenis BMD Peralatan dan Mesin (kodefikasi 1.3.2) diluar lampiran 2, 3, 6, 7, 8, 9 disarankan masuk ke belanja terkait urusan		dalbang
	Dapat juga digunakan untuk pengadaan peralatan olahraga					
X.XX.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Digunakan untuk menyediakan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (lihat lampiran 11)	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	Disarankan tidak digunakan, karena: 1. Untuk Buku, dapat digabungkan dengan sub kegiatan X.XX.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 2. Sedangkan BMD lainnya disarankan masuk ke belanja terkait urusan		dalbang
X.XX.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Digunakan untuk menyediakan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (lihat lampiran 12)	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	unit	disarankan tdk digunakan untuk efisiensi (dapat diletakkan pada subkeg urusan)		dalbang

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja	OPD Perumus
X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Digunakan untuk menyediakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			dalbang
X.XX.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Digunakan untuk menyediakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			dalbang
X.XX.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Digunakan untuk menyediakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			dalbang
X.XX.01.1.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Digunakan untuk menyediakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha			dalbang
X.XX.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD						
X.XX.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Digunakan untuk pendanaan operasional pelayanan BLUD (utk SKPD yng memiliki BLUD)	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit kerja			BKD

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja	OPD Perumus
-----------------------------------	------------------------------	-------------------	--------	---------	------------------------	-------------

DRAFT RUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TA 2024

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja	OPD Perumus
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Persentase cadangan pangan yang tersedia	%			DKP
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan upaya peningkatan infrastruktur dan Sumber daya Manusia dalam rangka mendukung kemandirian pangan di Kota Payakumbuh	- Persentase cadangan pangan masyarakat	%			DKP
2.09.02.2.01.01 Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	melakukan pengadaan sarana prasarana infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	unit			DKP
2.09.02.2.01.02 Penyediaan infrastruktur lantai jemur	melakukan pengadaan sarana prasarana infrastruktur lantai jemur	Jumlah lantai jemur yang tersedia	unit			DKP
2.09.02.2.01.03 Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	melakukan pengadaan sarana prasarana infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	unit			DKP
2.09.02.2.01.04 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik	- Melakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik seperti rapat, sosialisasi, pendataan dan kegiatan lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	laporan			DKP
2.09.02.2.01.05 Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Melakukan kegiatan penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Jumlah rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	dokumen			DKP
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Melakukan Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Distribusi Dan Pemberdayaan Di Tingkat Masyarakat Dengan Memfasilitasi Upaya Koordinasi, Pemantauan, Pengkajian, Penyiapan Perumusan Kebijakan Dan Pengembangan Di Bidang Ketahanan Pangan	-persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE !- Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	%			DKP

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja	OPD Perumus
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Menyediakan Dan Mendistribusikan Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Dengan Penyediaan Informasi Harga, Analisa Data, Pemantauan Stok Dan Pasokan Pangan Yang Tersedia Bagi Masyarakat Serta Melakukan Upaya Untuk Pengembangan Kelembagaan Dan Jaringan Distribusi Pangan	- persentase pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan '- persentase informasi harga yang up to date	%			DKP
2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1. Penyediaan Informasi Harga Pangan Melalui Kegiatan Pemantauan Harga Jaringan Informasi Harga Pangan Di Tingkat Produsen Dan Konsumen Yang Disampaikan Melalui Aplikasi My kopay 2. Penyusunan Neraca Bahan Makanan Melalui Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisa Data Yang Menyajikan Gambaran Menyeluruh Tentang Penyediaan, Penggunaan Dan Ketersediaan Pangan Di Kota Payakumbuh Dalam Satu Tahun	- jumlah laporan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	laporan			DKP
2.09.03.2.01.02 Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Melakukan kegiatan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal seperti memberikan bantuan pangan lokal dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, subsidi harga pangan lokal bagi masyarakat dan kegiatan lainnya	jumlah laporan pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	laporan			DKP
2.09.03.2.01.03 Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaa distribusi pangan pokok da pangan lainnya seperti rapat-rapat, dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	laporan			DKP
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Melakukan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan di Kota Payakumbuh	Jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	dokumen			DKP

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja	OPD Perumus
2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	a. Pembinaan dan monitoring Terhadap Lembaga Distribusi Pangan Yang Sudah Ditumbuhkan Dan Koordinasi Dengan Kelompok Dan Gapoktan Agar Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tetap Tumbuh Dan Berkembang Dan Mampu Menyediakan Dan Mendistribusikan Gabah/beras b. Mempromosikan Produk-produk Yang Dihasilkan Oleh Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Yang Ada Di Kota Payakumbuh Untuk Meningkatkan Nilai Jual Dan Mengembangkan Pemasarannya c. Memberikan Penghargaan kepada lembaga Masyarakat dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	unit			DKP
2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	a. pembinaan dan monitoring kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia b. memberikan bantuan biaya operasional lembaga usaha pangan masyarakat	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	unit			DKP
2.09.03.2.01.07 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Melakukan usaha pembinaan, pelatihan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan keluarga kepada keluarga di Kota Payakumbuh seperti sosialisasi/pelatihan , bantuan pangan	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	keluarga			DKP
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Melakukan Penyediaan Dan Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten/kota dengan baik sehingga bisa mengatasi terjadinya masalah kekurangan pangan akibat bencana maupun keadaan darurat, kelebihan ketersediaan pangan dan gejolak harga pangan	persentase cadangan pangan pemerintah daerah	%			DKP
2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kota Payakumbuh seperti pembinaan dan pengawasan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota	laporan			DKP
2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Melakukan penyusunan dokumen rencana kebutuhan pangan lokal	Jumlah rencana kebutuhan pangan lokal	dokumen			DKP
2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Melakukan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibeli dan dititipkan di Perum Bulog Wilayah Sumbar	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	ton			DKP
2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Melakukan pemeliharaan terhadap cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota yang terpelihara	ton			DKP

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja	OPD Perumus
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Melaksanakan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan AKG	- persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan '- persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu	%			DKP
2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per kapita per tahun	Menyusun dan melakukan analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Yang Menyajikan Data Untuk Menyusun Perencanaan Kebutuhan Konsumsi Pangan Di Kota Payakumbuh Dalam Satu Tahun	Jumlah Dokumen Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen			DKP
2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman, kepedulian dan menggalang Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis Sumberdaya	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan			DKP
2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka meningkatkan sinergi ketahanan pangan dengan mengkomunikasikan hasil pembangunan ketahanan pangan kepada masyarakat dan memperkenalkan serta mempromosikan produk pangan lokal daerah di tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	laporan			DKP
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Melakukan Upaya Untuk Menangani Suatu Kondisi Ketidak Cukupan Pangan Yang Dialami Oleh Daerah, Masyarakat Atau Rumah Tangga, Pada Waktu Tertentu Untuk Memenuhi Standar Kebutuhan Fisiologis Bagi Pertumbuhan Dan Kesehatan Masyarakat Serta Dilengkapi Dengan Data, Peta, Analisis Terpadu Dan Informasi Yang Akurat	Skor PPH Ketersediaan	Nilai			DKP
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Menyusun Analisis Peta Informasi Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Kota Yang Akurat, Komprehensif Dan Tertata Baik Sebagai Pedoman Dalam Pembuatan Keputusan Tingkat kota Dalam Rangka Mengantisipasi, Mencegah Dan Menangani Persoalan Kerentanan Dan Kerawanan Pangan Masyarakat	- persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait	%			DKP

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja	OPD Perumus
2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	a. Penyediaan Informasi Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (FSVA) Sebagai Pedoman Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanganan Kerawanan Pangan Dan Gizi b. Penyediaan Informasi Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (SKPG) Melalui Proses Pengumpulan Serta Analisa Data Situasi Pangan Dan Gizi Dalam Rangka Deteksi Dini Dan Antisipasi Kejadian Rentan Pangan Dan Gizi	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	dokumen			
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Melakukan Upaya Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Dan Penanganan Bencana serta antisipasi terjadinya kerawanan pangan Baik Dibidang Pertanian Dan Bidang Lainnya	persentase peningkatan hasil pemanfaatan pekarangan	%			DKP
2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Pertemuan Koordinasi Sebagai Upaya Dalam Pemecahan Permasalahan Ketahanan Pangan Yang Berkembang Saat Ini Serta Perumusan Kebijakan Dalam Rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah/Wilayah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	laporan			DKP
2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Dan Antisipasi Kejadian Rawan Pangan Dan Gizi Masyarakat Berupa Intervensi Untuk Penanggulangan Kejadian Rawan Pangan Kronis Atau Kejadian Rawan Pangan Transien	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	dokumen			DKP
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Melakukan Upaya Untuk Mencegah Pangan Dari Kemungkinan Cemar Biologis, Kimia Dan Benda Lain Yang Dapat Mengganggu, Merugikan Dan Membahayakan Kesehatan, Tidak Bertentangan Dengan Agama Dan Budaya Masyarakat Melalui Pemantauan, Sertifikasi, Registrasi Dan Rekomendasi Keamanan Pangan	persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	%			DKP
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan Pengawasan Pangan Segar Yang Beredar Di Masyarakat Untuk Pengendalian Kontaminasi Dari Zat-zat Berbahaya Serta Pengendalian Tingkat Cemar Residu Pestisida Dan Meminimalisir Bahaya Cemar Zat Kimia Lainnya Pada Pangan Segar	persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan	%			DKP

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CATATAN	alternatif isi belanja	OPD Perumus
2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan yang dilakukan untuk penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk pengawasan pangan segar yang beredar, rapat teknis lembaga/instansi terkait, peningkatan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keamanan pangan, serta kegiatan lainnya kepada masyarakat	Jumlah Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	dokumen			DKP
2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan yang dilakukan untuk penerbitan registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen			DKP
2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan untuk meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam Menerapkan Sistem jaminan mutu dan Keamanan Pangan pada tingkat produsen, distributor, dan konsumen dalam bentuk pelatihan/sosialisasi atau kegiatan lainnya	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen			

Payakumbuh, Januari 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DINAS KETAHANAN PANGAN

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator
Ditulis kebijakan/program/ kegiatan dan tujuan dari kegiatan	Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada	Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)	Sebab kesenjangan yang datangnya dari dalam organisasi/SKPD	Sebab kesenjangan yang datangnya dari luar organisasi/SKPD	Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender	Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan	Base Line Data	Indikator capaian dan target responsif gender (Input, Outcomes)
Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1) Banyaknya lahan pekarangan masyarakat yang belum dimanfaatkan secara optimal yang sejatinya dapat ditanami berbagai macam tanaman yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya hidup sehari-hari dengan tanpa harus membeli ke warung atau pasar. Selain itu, Pemerintah berusaha menekan konsumsi beras dan terigu dengan mengeluarkan PP no 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. 2) Masih rendahnya konsumsi olahan pangan lokal	1). Dari aspek akses Dari segi akses tidak terlalu berpengaruh karena pekarangan rumah sangat mudah diakses bagi kaum pria ataupun wanita, namun untuk pengolahan pangan lokal belum terlalu diminati oleh kaum pria. 2). Partisipasi keaktifan kaum laki-laki dalam hal ini masih terbatas dikarenakan kaum laki-laki merasa kegiatan ini merupakan pekerjaan perempuan 3). Dari aspek Kontrol keterbatasan kaum pria dalam kegiatan ini mengakibatkan kontrol mereka terhadap kegiatan ini sangat terbatas 4). Dari aspek Manfaat, tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan. Kegiatan ini bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. 5). Dari aspek akses Dari segi akses tidak terlalu berpengaruh karena pekarangan rumah sangat mudah diakses bagi kaum pria ataupun wanita	1). Masih belum mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatan 2). Pelatihan yang diadakan hanya untuk anggota PKK, KWT dan Dasawisma (kaum wanita) 3. Belum tersedianya data pilah gender	1). Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender 2). Laki-laki masih kurang keikutsertaan dalam pemanfaatan pekarangan	A) Tujuan : *) Meningkatkan pengetahuan dan kreatifitas masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam memanfaatkan lahan pekarangan tempat tinggal mereka dan mengolah pangan lokal B) Aktivitas : *) Melakukan pelatihan tentang pemanfaatan pekarangan *) Melakukan pembinaan terhadap KWT dan Dasawisma *) Melaksanakan pelatihan dan lomba pengolahan pangan lokal	Pelatihan pengolahan pangan lokal non beras non terigu, pembinaan pemanfaatan pekarangan, Sosialisasi beragam bergizi seimbang dan aman, Sosialisasi Konsumsi Pangan Lokal Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Aktivitas 1 : Melakukan pelatihan pangan lokal non beras non terigu Aktivitas 2 : Melakukan pembinaan terhadap KWT Aktivitas 3. : Melaksanakan Sosialisasi beragam bergizi seimbang dan aman 4 : Melaksanakan sosialisasi konsumsi pangan lokal	Input : PKK, KWT dan Dasawisma Output : Meningkatnya pengetahuan anggota PKK, KWT dan Dasawisma Outcomes : Termanfaatkannya lahan pekarangan secara optimal dan meningkatnya kreatifitas dalam pengolahan pangan lokal	In put : Dana yang dibutuhkan sebanyak Rp. 181.242.450, pelaksana dari Dinas Ketahanan Pangan , peserta pelatihan lokal non beras non terigu 30 orang, peserta sosialisasi bergizi seimbang dan aman 30 orang, peserta sosialisasi pangan lokal sebanyak 32 orang Out put : Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal Out comes : 1. Banyaknya warga yang memanfaatkan pekarangan sehingga membantu menghidup sehari-hari. 2. Meningkatnya keanekaragaman pangan lokal yang diolah sehingga bernilai ekonomi .
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
Tujuan : Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat dan kemampuan PKK, KWT/Masyarakat dalam mengkreasikan olahan pangan lokal								

Sumber: Gender Analysis Pathway (GAP) and Policy Outlook for Action Plan (POP) ; Bappenas & Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan; (2007)



GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DINAS KETAHANAN PANGAN

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pili Gender)	Isu Gender		Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator
Ditulis kebijakan/program/ kegiatan dan tujuan dari kegiatan	Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada	Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)	Sebab kesenjangan yang datangnya dari dalam organisasi/SKPD	Sebab kesenjangan yang datangnya dari luar organisasi/SKPD	Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender	Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan	Base Line Data	Indikator capaian dan target responsif gender (Input, Outcome)
Program :								
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kegiatan ini berupa sosialisasi kepada Gapoktan tentang pengelolaan LDPM tersebut. Gapoktan ini didominasi oleh kaum laki-laki namun, ada juga kaum perempuan yang ikut andil dalam kegiatan ini. Meskipun, persentasenya hanya sedikit.	1). Dari aspek akses Kaum wanita sebenarnya memiliki akses yang cukup baik, tetapi anggota didominasi oleh kaum laki-laki. 2). Partisipasi kaum perempuan sangat sedikit karena lebih banyak kaum laki-laki yang terlibat. 3). Dari aspek Kontrol Kontrol kaum perempuan sangat terbatas, karena kurangnya keterlibatan mereka pada kegiatan ini. 4). Dari aspek Manfaat kegiatan ini memberikan manfaat yang sama bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Karena, kegiatan ini berhubungan dengan ketersediaan pangan masyarakat.	1). Keterbatasan dana, sehingga keterlibatan audiens baik kaum laki-laki maupun perempuan terhadap kegiatan juga terbatas.	1). Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender 2). Kaum wanita kurang meminati kegiatan ini karena banyak dilakukan oleh kaum pria. 3). Masih belum mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatan	A) Tujuan : *) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang LDPM B) Aktifitas : *) Melakukan pembinaan terhadap LDPM yang ada	Melakukan pembinaan serta koordinasi Sub Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Aktivitas 1 : Melakukan pembinaan dan koordinasi	Input : Pengurus dan anggota Gapoktan Output : Meningkatnya pengetahuan pengurus dan anggota Gapoktan tentang LDPM. Outcomes : Terjaminnya kelancaran distribusi pangan.	In put : Dana yang dibutuhkan sebanyak Rp.5.999.900- Pen anggota Gapoktan yang men sosialisasi sudah responsif g Out put : Jumlah koordinasi pembinaan LDPM, Out comes : 1. Berkemban usaha kelembagaan distribus 2. Banyaknya kaum wanita mengikuti kegiatan ini.
Sub Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan								
Tujuan : Menjamin kelancaran distribusi pangan masyarakat								

Sumber: Gender Analysis Pathway (GAP) and Policy Outlook for Action Plan (POP) ; Bappenas & Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan; (2007)

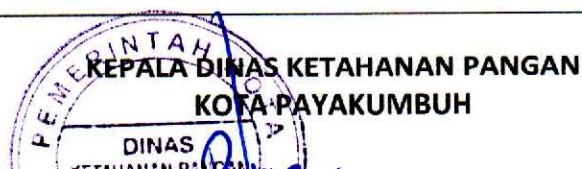
Payakumbuh, 14 Maret 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan

EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

GENDER BUDGET STATEMENT PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
TAHUN ANGGARAN : 2024

Program	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
Sub Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
Kode kegiatan	2.2.09.03.2.04.02		
Analisis Situasi	1. Data Pembuka Wawasan Banyaknya lahan pekarangan masyarakat yang belum dimanfaatkan secara optimal yang sejatinya dapat ditanami berbagai macam tanaman yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya hidup sehari-hari dengan tanpa harus membeli ke warung atau pasar. Selain itu, Pemerintah berusaha menekan konsumsi beras dan terigu dengan mengeluarkan PP no 22 tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender - Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender - Kegiatan hanya difokuskan pada KWT, PKK dan Dasawisma (kaum wanita) - Kurangnya minat kaum pria pada kegiatan ini - Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender - Tidak adanya minat kaum pria pada kegiatan ini.		
Rencana Tindak	Kegiatan	Pelatihan pengolahan pangan lokal non beras non terigu, pembinaan pemanfaatan pekarangan, Sosialisasi beragam bergizi seimbang dan aman, Sosialisasi Konsumsi Pangan Lokal	
		Tujuan	Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat dan kemampuan KWT, PKK/ masyarakat dalam mengkreasikan olahan pangan lokal non beras non terigu sehingga menjadi makanan yang bernilai, lezat, bergizi, bersaing dan diminati oleh anak-anak dan masyarakat
		Aktivitas 1	Pelatihan keterampilan anggota KWT dan Dasawisma untuk menanam sayuran di pekarangan
		Aktivitas 2	Sosialisasi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
		Aktivitas 3	Pelatihan pengolahan pangan local
		Aktivitas 4	Sosialisasi Konsumsi Pangan Lokal
		Sumber Daya/Input	a. Modul Pelatihan Keterampilan b. KWT, Dasawisma, TP PKK c. Narasumber
		Output	a. 1 Modul Pelatihan Per Orang b. Terselenggaranya pelatihan keterampilan bagi anggota KWT, PKK dan Dasawisma
Sumber Dana	Anggaran	Rp. 181.242.450,-	
	SDM	Anggota PKK, Anggota KWT dan Dasawisma	
Dampak / Hasil / Manfaat	Termanfaatkannya lahan pekarangan secara optimal dan Masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE		



GENDER BUDGET STATEMENT

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
TAHUN ANGGARAN : 2024

Program	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
Sub Kegiatan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan		
Kode kegiatan	2.2.09.03.2.01.05		
Analisis Situasi	1. Data Pembuka Wawasan - LDPM dilaksanakan oleh Gapoktan di sentra padi/jagung. Kegiatan LDPM agar dapat melakukan jual beli gabah/padi terutama pada saat panen raya, dimana pasokan pangan melimpah. Biasanya harga di tingkat petani jatuh karena ulah para tengkulak yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. - Peningkatan kemampuan unit cadangan pangan mengelola sebagian gabah/beras untuk cadangan pangan Gapoktan terutama pada saat paceklik. - Peningkatan kemampuan unit usaha milik Gapoktan untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan volume cadangan pangan secara berkelanjutan. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender - Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender - Kurangnya minat kaum wanita pada kegiatan ini.		
Rencana Tindak	Kegiatan	Pembinaan dan monitoring ke LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat)	
		Tujuan	Koordinasi dan pembinaan LDPM,
		Aktivitas 1	Pemantauan/pembinaan
		Aktivitas 2	Koordinasi
		Sumber Daya/Input	2 LDPM, dimana anggota Gapoktan pelaksana LDPM beranggotakan kelompok tani dan KWT
		Output	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan LDPM
Sumber Dana	Anggaran	Rp. 5.999.900,-	
	SDM	Pengurus dan anggota Gapoktan	
Dampak / Hasil / Manfaat	Menjamin kelancaran distribusi pangan masyarakat.		

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH**



EDVIDEL ARDA, S. IP

NIP. 19700124 199003 1 001

PEMETAAN PEMUTAHIRAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEG RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

OPD : Dinas Ketahanan Pangan

SEBELUM PEMUTAHIRAN			SETELAH PEMUTAHIRAN			KET
NOREK	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEG	PAGU	NOREK	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEG	PAGU	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.330.082.772	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.330.082.772	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.683.899.055	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.683.899.055	
2.09.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	24.856.000	2.09.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	24.856.000	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	17.170.050	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	17.170.050	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	7.685.950	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	7.685.950	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.279.887.763	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.279.887.763	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.142.158.513	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.142.158.513	
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.312.000	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.312.000	
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	8.417.250	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	8.417.250	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.997.400	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.997.400	
2.09.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	2.09.01.2.05.0005	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	
2.09.01.2.05.05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	9.997.400	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	9.997.400	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.775.600	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.775.600	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.611.000	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.611.000	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	16.254.200	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	16.254.200	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.251.000	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.251.000	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.390.400	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.390.400	
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	156.269.000	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	156.269.000	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	
2.09.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	
2.09.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	
2.09.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	2.09.01.2.07.0011	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	
2.09.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	2.09.01.2.07.0011	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	
2.09.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	62.042.292	2.09.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	62.042.292	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.483.500	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	1.483.500	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.740	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.740	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60.458.052	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60.458.052	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.340.000	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.340.000	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	39.190.000	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	39.190.000	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	64.900.000	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	64.900.000	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	7.250.000	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	7.250.000	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	10.025.240	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	10.025.240	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.025.240	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.025.240	
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	10.025.240	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	10.025.240	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	405.662.030	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	405.662.030	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	101.234.824	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	101.234.824	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	21.834.720	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kab/kota	17.127.360	

CASCADING TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN

RPD Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran

ESS II Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan pangan

Indikator	1.1 Ketersediaan Pangan Utama
-----------	-------------------------------

Sasaran 2 : Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Indikator	2.1	Skor PPH Konsumsi
-----------	-----	-------------------

2.2 Tingkat Keamanan Pangan

Sasaran 3 : Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

Indikator	3.1 Stabilitas Harga
-----------	----------------------

Sasaran 4 :	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan
-------------	--

Indikator	4.1	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan
-----------	-----	---

PENYELARASAN KINERJA SEKRETARIAT

ESS II

Sasaran 4	:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas
Indikator	:	1.1 Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat

ESS III

SEKRETARIS

Sasaran1	:	Meningkatnya kualitas perencanaan PD
Indikator	1.1	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja PD yang selaras dengan Renstra PD
Program	:	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran	:	Rp. 2.683.899.055,-

Sasaran 2	:	Meningkatnya kualitas pelayanan internal PD
Indikator	1.1	Nilai IKM
Program	:	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran	:	Rp. 2.683.899.055,-

ESS IV

Sub Koordinator Program & Keuangan

Sasaran 1	:	Meningkatnya realisasi keuangan PD
Indikator	1.1	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas
Sasaran 2	:	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program kegiatan PD
Indikator	2.1	Persentase capaian kinerja program / kegiatan
Kegiatan	:	1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Anggaran	:	Rp. 24.856.000,-

Kasubag Umum & Kepegawaian

Sasaran 1	:	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran
Indikator	1.1	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
Sasaran 2	:	Meningkatnya kualitas SDM perangkat daerah
Indikator	2.1	Persentase pemenuhan ASN dalam perangkat daerah sesuai dengan Analisi Jabatan & Analisis Beban Kerja
Sasaran 3	:	Meningkatnya kualitas dokumen pelayanan publik PD 3.1 Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik
Sasaran 4	:	Meningkatnya layanan kepegawaian 4.1 Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya lengkap 4.2 Persentase pengurusan KGB ASN tepat waktu
Kegiatan	:	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Anggaran	:	Rp. 2.683.899.055,-



PENYELARASAN KINERJA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN

ESS II

Sasaran 2	:	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman
Indikator	:	Skor PPH Konsumsi Tingkat Kemanan Pangan

ESS III

BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN									
Sasaran1	:	Meningkatnya konsumsi kelompok bahan pangan sesuai standar Angka Kecukupan Energi (AKE)	Sasaran1	:	Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya pangan lokal non beras non terigu	Sasaran3	:	Meningkatnya pangan yang aman dikonsumsi	
Indikator	1.1	Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE	Indikator	1.1	persentase penurunan konsumsi beras	Indikator	1.1	persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	
Program	:	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program	:	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program	:	Pengawasan Keamanan Pangan	
Anggaran	:	Rp. 230.837.520,-	Anggaran	:	Rp. 230.837.520,-	Anggaran	:	Rp. 91.296.370,-	

ESS IV

↓			↓			↓		
Sub Koordinator Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan			Sub Koordinator Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan			Sub Koordinator Keamanan dan Kelembagaan Pangan		
Sasaran1	:	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan	Sasaran 1	:	meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu	Sasaran 1	:	meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zat berbahaya bagi pangan
Sasaran 2	:	Meningkatnya fasilitasi terhadap masyarakat dalam melaksanakan diversifikasi pangan	Sasaran 2	:	meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan pangan lokal non beras non terigu	Sasaran 2	:	meningkatkan fasilitasi instansi dalam keamanan pangan
Indikator	1.1	persentase masyarakat (anggota KWT) yang memahami diversifikasi konsumsi pangan	Indikator	1.1	persentase masyarakat (anggota KWT) yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu	Indikator	1.1	persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan
	2.1	persentase masyarakat yang mendapatkan pendampingan		2.1	persentase meningkatnya sarana pengolahan		2.1	persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait
Sub Kegiatan :	1. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal		Sub Kegiatan :	1. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun		Sub Kegiatan :	1. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota 2. Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	
Anggaran	:	Rp. 230.837.520,-	Anggaran	:	Rp. 230.837.520,-	Anggaran	:	Rp. 91.296.370,-